

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN
PESANTREN DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Salman Al Farisi
NIM. T20163040

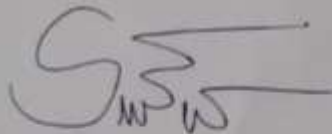
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA
JULI 2023

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN
PESANTREN DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Oleh:



Salman Al Farisi
NIM. T20163040

Disetujui Pembimbing



Dani Hormawan, M.Pd.
NIP. 198901292019031009

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN
PESANTREN DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juli 2023

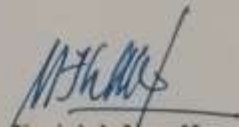
Tim Penguji

Ketua



Dr. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196802251987031002

Sekretaris



Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.
NIP. 199003202019032010

Anggota:

1. Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I., M.Pd.I
2. Dani Hermawan, M.Pd



Menyetujui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I .
NIP. 196405111999032001

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹ (Q.S Shaad : 29)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit Wali. 2012), 241

PERSEMBAHAN

Dengan selalu menyebut nama Allah dan mengharap ridlo, hidayah dan inayah-Nya, serta sholawat yang selalu kupanjatkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW. kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang teramat aku sayangi dan hormati:

1. Untuk ayah Moch. Syafi,i dan ibu Nur Imamah yang selalu memberi semangat meski dalam ke adaan di titik terendah. Terimakasih atas ketulusan dan segala perjuangan dalam mendidik, menyayangi, mencintai dan memperjuangkan saya hingga saat ini;
2. Untuk Adikku Nabilul umam yang tak ada henti mendorongku untuk tetap semangat;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah tidak ada kata yang patut terucapkan, kecuali rasa syukur kehadiran Allah SWT. Maha pemantau segala aktivitas makhluk. Dengan limpah rahmat hidayah dan inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar. Meskipun jauh dari kesempurnaan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. sang revolusioner sejati pendobrak era Jahiliyah menuju era Islamiyah. Beliau sebuah panutan insan dan pemimpin sepanjang zaman

Skripsi yang berjudul "Manajemen pembiayaan dalam membangun kemandirian pesantren di pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur." disusun dalam rangka melengkapi tugas untuk menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Kependidikan Islam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai tempat penulis mewarnai pemikiran, pendidikan dan penulis bisa merasakan indahnya bangku perkuliahan

Banyak bantuan serta motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE,MM, selaku Rektor UIN KHAS Jember, semoga dalam kepemimpinannya, UIN KHAS lebih terpercaya dan mampu mencetak calon penerus bangsa yang progresif. Amin
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan ijin tempat melakukan penelitian.
3. Bapak Dr. H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd. selaku koordinator program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi dan semangat semasa kuliah
4. Bapak Dani Hermawan, M.Pd.. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan secara baik serta motivasi, semangat dan support. Semoga beliau diberikan balasan yang layak dari Allah SWT.
5. Almamater dan civitas akademika UIN KHAS jember yang telah menjadi wadah selama saya menuntut ilmu.

Semoga segala amal yang telah bapak/ ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Jember, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Salman Al Farisi, 2023: *Manajemen pembiayaan dalam membangun kemandirian pesantren di pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur*

Kata Kunci : Manajemen pembiayaan, kemandirian pesantren

Salah satu hal terpenting dalam manajemen pondok pesantren adalah manajemen pembiayaan. Manajemen merupakan faktor kelemahan yang paling mendasar di lingkungan pondok pesantren. Padahal, manajemen yang mapan untuk sebuah institusi semacam pondok pesantren salafiyah sangat diperlukan dan dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dalam pondok pesantren, pengelolaan keuangan sering menimbulkan permasalahan serius bila pengelolaanya kurang baik. Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di suatu lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren salafiyah. Hal ini dikarenakan seluruh komponen pendidikan sangat erat kaitannya dengan komponen keuangan.

Fokus penelitian ini : 1) Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan yang diterapkan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam membangun kemandirian pesantren ?, 2) Bagaimana penerapan manajemen pembiayaan dalam Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?, 3) Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif Penentuan subyek penelitian dilakukan secara *Purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis Data menggunakan deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Keabsahan data menggunakan triangulasi Sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Dalam proses manajemen pembiayaan pondok pesantren sidogiri untuk membangun kemandirian pesantren dengan menerapkan tahapan pelaksanaan perencanaan yaitu: evaluasi program yang telah dijalankan, rapat pleno 1 untuk merancang program yang akan datang, dan rapat pleno 2 untuk pengesahan program yang telah direncanakan. 2) Dalam penerapan pembiayaan dalam membangun kemandirian pesantren. Besar anggaran yang akan diberikan menyesuaikan dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Yang diambil dari uang pendaftaran santri 20% dan 80 % dari hasil kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pondok pesantren secara mandiri. pengambilan anggaran belanja dilakukan oleh ketua pelaksanaan program kegiatan yang telah diketahui dan diverifikasi oleh kordinator. 3) Dalam evaluasi manajemen pembiayaan untuk membangun kemandirian pesantren pengurus melaksanakan kegiatan Pelaporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilakukan pada tiap tahun. Dan melakukan pemeriksaan keuangan (*auditing*) dengan cara melaporkan semua hasil pendapatan dan pengeluaran dalam satu tahun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Teori	11
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	36
B. Lokasi penelitian	37
C. Subyek penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37

E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	84
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, ada beberapa faktor yang berperan dalam sistem penyelenggaraan Pondok Pesantren yaitu, manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor sarana, dan administrasi sebagai faktor karsa. Ketiga faktor ini memberi arah dan perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pondok pesantren masing- masing.

Dalam pengelolaan pondok sebagai suatu lembaga pendidikan, peran Kyai sangat besar dalam menentukan tujuan dan kegiatan yang harus dilakukan. Keadaan ini telah menjadikan hampir seluruh pengelolaan sumberdaya baik fisik ataupun finansial banyak ditangani langsung oleh Kyai atau oleh Keluarga Kyai dengan bantuan Santri yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan keseharian dan pendidikan Pondok Pesantren. Secara umum, kepengurusan dalam Pesantren terdiri dari kyai, guru/ustadz, pengurus pondok pesantren, pimpinan unit- unit kegiatan dan tenaga kesekretariatan pondok pesantren.

Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Sehingga format Pesantren kedepan haruslah mampu bersaing dengan

lembaga- lembaga pendidikan yang lain dengan menata kembali manajemen yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Tujuan adanya pesantren tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3 menyatakan bahwa, adanya pesantren bertujuan untuk membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 1

meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.²

Manajemen merupakan faktor kelemahan yang paling mendasar di lingkungan pondok pesantren. Padahal, manajemen yang mapan untuk sebuah institusi semacam pondok pesantren sangat diperlukan dan dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.³ Andai kata pondok pesantren sejak semula dikelola secara profesional berdasarkan skill aspek manajerial, tentu pondok pesantren telah mampu berkembang dengan pesat dan akan menjadi pusat kajian keislaman yang progresif dan produktif.⁴

Pemerintah telah menyediakan dana untuk pesantren, namun bukan berarti pesantren hanya bergantung dari dana tersebut. Pesantren harus bisa menjadi lembaga yang mandiri. Yaitu pesantren yang mampu mengelola dan menghasilkan dana tanpa mengharap bantuan dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui pembiayaan adalah suatu komponen strategik yang dapat menentukan maju atau tidaknya suatu tujuan pendidikan yang telah dibuat.⁵

Selain itu, kelemahan pondok pesantren yang juga sangat prinsip adalah ketiadaan wirausaha permanen, sekalipun ada beberapa pondok pesantren yang telah memiliki koperasi pondok pesantren (kopontren), kantin, dan lain

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3 tentang asas, tujuan dan ruang lingkup

³ Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren* (Yogyakarta : Pilar Religia, 2005), 112.

⁴ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara, 2007), 59

⁵ Siti Mazidah, *Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren*. Jurnal pendidikan dan pendidikan dasar. Vol 3.No 1.2018

sebagainya. Namun mayoritas masih dikelola secara amatir dan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) santri⁶

Salah satu pesantren yang mampu menjadi pesantren yang mandiri dan masih eksis dalam dunia pendidikan adalah pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, pesantren yang didirikan pada tahun 1158H/1748M ini sudah mampu menjadi pesantren yang mandiri dapat kita ketahui bersama pesantren ini dapat mengembangkan bisnis seperti super market, koperasi, air mineral dan lain-lain guna penunjang keuangan pesantren. Namun untuk mencapai titik ini dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Pesantren yang baru berdiri tentu tidak bisa menunggu waktu yang selama itu untuk mencapai kemandirian, Pesantren harus mampu bertahan ditengah tuntutan zaman dan persaingan dengan lembaga lain. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang cocok untuk diimplementasikan dalam pendidikan pesantren agar dapat menjadi pesantren mandiri yang tidak bergantung dari dana pemerintah serta dapat menghasilkan dan mengelola dana sendiri. Kemandirian bukan berarti meneyendiri atau serba sendiri. Seorang yang mandiri adalah seseorang yang mampu membangun nilai pada dirinya sehingga mampu menjadi bermanfaat bagi kehidupan.⁷ Pembiayaan dalam bidang pendidikan tidak lepas dari kebutuhan pendidikan baik yang secara langsung maupun tidak langsung. pendanaan dalam pendidikan didefinisikan

⁶ Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren*, 68

⁷ Misjaya, Didin Saefudin Bukhori, Adian Husaini, Ulil Amri Syafri. *Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo-Jawa timur*. Jurnal pendidikan islam. Vol 8. No 1. Februari 2019

sebagai seluruh pengeluaran yang dikeluarkan baik itu berupa uang, barang, dan tenaga, jumlah gaji guru, dan umlah siswa.⁸

Dilihat dari fungsi manajemen secara umum, maka manajemen pesantren memerlukan lima fungsi manajemen yaitu : perencanaan (planing), pengorganisasian (organizing), penggerakan/pelaksanaan (actuating), memimpin (guiding), mengendalikan (controlling) dan pencapaian tujuan (the achievement of the goal).⁹ dari kelima fungsi tersebut menegaskan betapa pentingnya manajemen terhadap pesantren, terlebih lagi manajemen yang mengatur dalam lingkup pembiayaan pesantren.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang sudah dilakukan pada Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur merupakan pesantren yang mampu menjadi pesantren mandiri, Diusia pesantren yang tergolong masi muda, Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur sudah mampu mengelola pembiayaan dengan baik tanpa mengharap pemberian dari pemerintah. hal ini dibuktikan dengan pengelolaan keuangan dari pesantren yang mampu menghasilkan dan mengelola keuangan secara mandiri, dapat di lihat dari penghasilan Pesantren yang berdasar SPP santri dan pengelolaan koperasi pesantren serta diperkuat dengan prinsip kiyai yang tidak akan menerima bantuan keuangan dari pemerintah sepeserpun. Pentingnya penelitian ini terletak pada implementasi manajemen pembiayaan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan mutu manajerial dalam bidang pembiayaan yang pada akhirnya juga dapat

⁸ Nur Eka Setiowati. *Manajemen Pembiayayn pondk pesantren DAN Lembaga Pendidikan Terpadu Nurul Shiddiq Cirebon*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 170.

⁹ Baharuddin dan Moh. Makin. *Manajemen Pendidikan Islam*. (Malang: Uin-Maliki Malang Press). 2016, 69.

mecipkakan santri yang berkualitas dan memajukan pesantren itu sendiri, dan untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun yang akan datang, terutama untuk menjawab tantangan masa depan.

Uniknya pondok pesantren sidogiri menggunakan semua unsur kemampuannya untuk memenuhi kemandirian pesantren dengan mengelola sumber daya ekonomi yang ada disana dan mampu bertahan lebih dari dua abad lamanya sehingga masih tetap eksis sampai sekarang, hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti dan sangat perlu untuk melakukan pendalaman penelitian terkait manajemen pembiayaan dalam memenuhi kemandirian pondok pesantren di sidogiri.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian di Pesantren tersebut. Untuk menghindari adanya pelebaran dan perluasan topik, maka peneliti memfokuskan penelitian pada “MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PESANTREN DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN, JAWA TIMUR.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan yang diterapkan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam membangun kemandirian pesantren ?
2. Bagaimana penerapan manajemen pembiayaan dalam Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?

3. Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan manajemen pembiayaan seperti apa yang digunakan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam membangun kemandirian pesantren.
2. Untuk mengetahui bagaimana peng-implementasian manajemen pembiayaan Pesantren Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam membangun kemandirian pesantren.
3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan manajemen pembiayaan terhadap kemandirian Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai dasar perbandingan dan referensi tambahan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut di masa depan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Sebagai kontribusi berupa informasi terkait manajemen pembiayaan dalam membangun kemandirian Pesantren

- b. Bagi Peneliti Sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan terkait bidang manajemen pembiayaan dalam membangun kemandirian pesantren, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa mendatang.
- c. Bagi Pihak Lain Untuk memperkaya khazanah keilmuan bagi para pengelola Pondok Pesantren khususnya dalam pembiayaan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren.

E. Definisi Istilah

1. Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh suatu badan yang menjalankan kegiatan usahanya.

2. Kemandirian Pesantren

Kemandirian pesantren adalah keadaan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam menopang tiga fungsi yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi istilah, maka yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan dalam membangun kemandirian pesantren adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengelola pembiayaan (keuangan) pesantren dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. kemandirian dalam konteks penelitian ini mengupayakan agar tercapainya pesantren yang mampu menghasilkan dan mengelola dana sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pedoman karya ilmiah terdiri dari lima bab, bagian awal meliputi : halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, daftar table yang dilanjutkan dengan bab I sampai bab IV, secara garis besarnya dapat dilihat sebagai berikut :

Bab satu yang merupakan pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang konteks penelitian, kemudian dilanjut dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua yang merupakan bagian kajian kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, dan dilanjutkan pemaparan kajian teori.

Bab tiga yang merupakan metode penelitian yang membahas tentang : pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian yang dilanjutkan dengan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat merupakan penyajian data analisis yang tersusun dari gambaran penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian akhir ini ditutup

dengan saran-saran, baik saran yang ditujuakn pada organisasi, tenaga pengajar, anggota, serta pihak-pihak yang terkait, serta dilampirkan beberapa data pendukung untuk memperkuat hasil otentik penelitian

Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, pernyataan keasliaan tulisan, lampiran-lampiran data biodata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Definisi manajemen ada banyak pengertian, mulai dari koordinasi, kepengurusan, pengaturan dan pengorganisasian. Untuk memperjelas dan untuk menghindari pengertian yang berbeda antara pengertian satu dengan pengertian lainnya, maka dari itu penulis akan memaparkan pengertian manajemen secara komprehensif.

Asal kata manajemen adalah dari bahasa latin, yaitu kata *mamus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata tersebut selanjutnya disatukan kemudian menjadi kata kerja *manager* yang artinya menangani. Kata *manager* kemudian kembali ditafsirkan dalam bahasa Inggris dengan bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut *manager*. selanjutnya, *management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti pengelolaan.¹⁰

Kata manajemen memang memiliki banyak arti, para ahli kemudian menyampaikan pengertian yang berbeda. Adapun beberapa pengertian manajemen menurut para ahli diantaranya:

- a. Mary Parker Follet berpendapat bahwa, manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

¹⁰ Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 5.

- b. Stoner menyampaikan bahwa, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.
- c. Daft mengatakan bahwa, manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 4 tujuan tertentu.

Dapat kita lihat dari pengertiannya, manajemen memiliki pengertian yang sangat luas, yang didalam manajemen itu sendiri mencakup sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan mengoptimalkan segala sumber daya yang terdapat dalam sebuah organisasi dengan maksud mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Sedangkan manajemen sebagai ilmu yang memperelajari seni untuk mengatur atau mengkoordinasikan, maka diperlukan kemampuan dan keterampilan seorang pemimpin organisasi, sedangkan manajemen merupakan proses dimana didalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang diterapkan dan kemudian di evaluasi.

2. Prinsip-prinsip Manajemen

Adapun prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat fleksibel dalam arti dalam pengimplementasian prinsip manajemen tersebut harus sesuai dengan kondisi khusus dan situasi yang berubah karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi organisasi. Menurut Henry Fayol, seorang

pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, adapun prinsip umum manajemen terdiri dari:

- a. Pembagian kerja (division of work)
- b. Wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility)
- c. Disiplin (discipline)
- d. Kesatuan perintah (unity of command)
- e. Kesatuan pengarahan (unity of direction)
- f. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri (subordination of individual interests to the general interests)
- g. Pembayaran upah yang adil (remuneration)
- h. Pemusatan (centralization)
- i. Hierarki (hierarchy)
- j. Tata tertib (order)
- k. Keadilan (equity)
- l. Stabilitas kondisi karyawan (stability of tenure of personnel)
- m. Inisiatif (Inisiative)
- n. Semangat kesatuan (esprits de corps).¹¹

3. Fungsi Manajemen

Seluruh kegiatan dalam manajemen selalu mengarah pada pencapaian hasil akhir (output) yang sesuai rencana. Sedangkan dalam mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, maka diperlukannlah dalam suatu organisasi kegiatan manajerial yang atau disebut sebagai manajer,

¹¹ Di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen#cite_note-13 (Selasa, 02 November 2020, pukul 11:20 WIB)

dan seorang manajer harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga sebagai fungsi manajerial.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian manajemen, sampai saat ini para ahli belum mendapat kesamaan pendapat terkait fungsi manajerial, namun fungsi manajerial memiliki persamaan makna. Penulis akan memaparkan beberapa fungsi manajerial menurut para ahli untuk memperelas makna dari fungsi manajerial.

a. Harold Koontz dan O'Donnel memiliki pendapat bahwasanya fungsi manajemen meliputi:

- 1) Planning
- 2) Organizing
- 3) Staffing;
- 4) Directing;
- 5) Controlling.¹²

b. Henry Fayol menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

- 1) Planning;
- 2) Organizing;
- 3) Commanding;
- 4) Coordinating;
- 5) Controlling.¹³

¹² M. Manulang, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992) 17

¹³ Hasibuan Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) 3

c. fungsi manajemen juga dipaparkan oleh George R. Terry yang meliputi:

- 1) Planning;
- 2) Organizing;
- 3) Actuating;
- 4) Controlling.

B. Manajemen Pembiayaan

1. Pengertian dari manajemen keuangan (pembiayaan)

Pengertian dari manajemen keuangan (pembiayaan) adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan tertentu.¹⁴ Suad Husnan juga mengemukakan pendapat didalam bukunya manajemen keuangan (pembiayaan) menyangkut kegiatan perencanaan, analisi dan pengendalian keuangan.¹⁵ Serta menurut Agus Sartono manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketata usahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

¹⁴ Heru Sutojo, Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Jakarta: Selemba Empat. 1997),. 2

¹⁵ Suad Husnan & Enny Pudjiastutik, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), 4.

Dari pemaparan para pakar di atas terkait manajemen (pembiayaan) dapat kita tarik kesimpulan bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses pengaturan dan pengelolaan dana secara efektif dan efisien dalam usaha memenuhi segala kebutuhan pendidikan terlebih lagi yang berkaitan dengan perencanaan, pemenuhan, evaluasi dan pertanggung jawaban pemasukan dan pengeluaran dana tersebut.

2. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Adapun tujuan dari Manajemen Pembiayaan sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Kadarusman Jusuf dalam Miftahol Arifin memaparkan bahwasanya melalui kegiatan manajemen keuangan maka segala kebutuhan pembiayaan kegiatan pesantren dapat direncanakan, dan diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pondok pesantren secara efektif dan efisien. Sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan. Mana dari itu tujuan manajemen keuangan pondok pesantren meliputi:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pondok pesantren;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pondok pesantren;
- c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran pondok pesantren.¹⁶

¹⁶ Miftahol Arifin, Jurnal: Manajemen Keuangan Pondok Pesantren, Hlm 7, Diakses dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/2745/2022>, Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 09.28 WIB

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka diperlukanlah peran pengurus pesantren dalam mencari sumber dana pesantren, dan juga menempatkan bendahara yang berkompetensi dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta mengoptimalkannya secara benar sesuai ketentuan pesantren dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Sumber Pembiayaan

Matin mengemukakan bahwa sumber pembiayaan lembaga pendidikan dapat berasal dari manasaja. Akan tetapi kebanyakan sumber pembiayaan utama lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan negeri berasal dari pemerintah. Pada umumnya dana tersebut terdiri dari dana rutin seperti gaji dan dana operasional sekolah dan juga dana untuk perawatan fasilitas (OPF). Selain dari pemerintah, pembiayaan juga bisa bersumber dari masyarakat, baik yang merupakan dari orangtua siswa, sumbangan dari masyarakat, dunia usaha atau mitra lembaga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nanang Fattah bahwa sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari : orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni.¹⁷

4. Prinsip Dasar Manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren

Pengelola pondok pesantren yang mengembangkan pendidikan formal harus memperhatikan beberapa poin menyangkut manajemen pembiayaan, diantaranya adalah aturan anggaran pendapatan dan pembelanjaan pondok pesantren, sistematika pelaporan dan

¹⁷ Nanang Fattah, Standar Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 42-43

pertanggungjawaban pembiayaan baik kepada Pengasuh, Biro Keuangan, maupun badan pemeriksa keuangan sebagai badan pengaudit internal pondok pesantren. Selain itu pengurus pesantren yang mengelola keuangan atau pembiayaan juga harus memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan formal yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dana pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dan hendaknya dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

a. Transparansi

Miftahol Arifin mengutip dari materi pembinaan profesi Kepala Sekolah atau Madrasah menyatakan bahwa, arti dari transparan adalah adanya keterbukaan. Transparan dalam manajemen artinya terdapat keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan, contohnya keterbukaan dalam sumber pembiayaan beserta jumlahnya, rincian pemakaian dan pertanggung jawabannya yang harus jelas dan mudah di mengerti sehingga dapat memudahkan untuk ditelaah.

Begitupun transparansi dalam manajemen pembiayaan pesantren, karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dukungan dan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan seperti wali santri,

masyarakat dan pemerintah dalam mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan pesantren.

b. Akuntabilitas

Pengertian dari akuntabilitas adalah suatu kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam lingkup manajemen pembiayaan pondok pesantren, arti akuntabilitas adalah pemakaian dana pesantren dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan tujuan pesantren serta penganggaran yang telah ditentukan. Berlandaskan perencanaan anggaran yang telah ditentukan serta aturan yang berlaku maka pihak pesantren harus mampu mengalikasikan uang secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada Pengasuh, Kepala pondok pesantren, badan pemeriksa keuangan pesantren, wali santri, masyarakat dan pemerintah.

c. Efektivitas

Garner dalam Miftahol Arifin mendefinisikan efektifitas sebagai “*characterized by qualitative outcomes*” yang bermakna bahwa efektivitas bukan hanya tentang pencapaian tujuan, namun pencapaian tujuan yang hasilnya berkualitas serta berkaitan dengan pencapaian visi atau cita-cita lembaga. Yang ditekankan dalam efektivitas adalah kualitatif outcomes. Manajemen pembiayaan pesantren mampu dikatakan sesuai prinsip efektivitas apabila pesantren dapat mengatur

keuangan untuk diimplementasikan dalam kegiatan atau program dengan tujuan memperoleh hasil yang baik dengan kualitatif outcomes yang tepat dan dengan perencanaan yang telah ditentukan³⁵.

d. Efisiensi

Garner dalam Miftahol Arifin juga mengartikan efisiensi sebagai “*characterized by quantitative outputs*”. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output), atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran dan waktu. Kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan; penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitas.

5. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Thomas. H. Jones mengutarakan manajemen pembiayaan pendidikan terdiri dari tiga tahapan kegiatan, diantaranya adalah perencanaan (*budgeting*), pelaksanaan (*Accounting*) dan evaluasi (*auditing*).¹⁸

¹⁸ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 257

a. Perencanaan Pembiayaan (*Budgeting*)

1) Hakikat Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan pembiayaan atau keuangan juga bisa disebut penganggaran. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). *Budget* ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.¹⁹

Thomas H. Jones juga mengatakan bahwa *Budget maybe defined as the financial plan for the future, usually for one year but possibly a longer od shorter period of time*. Anggaran mungkin didefinisikan sebagai rencana keuangan untuk masa depan, biasanya untuk satu tahun namun mungkin lebih lama atau bisa jadi lebih singkat.²⁰

Definisi tersebut mengemukakan bahwa perencanaan adalah menghubungkan apa yang ada sekarang (*what is*), dengan bagaimana (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program dan alokasi sumber. Bagaimana seharusnya adalah mengacu pada masa yang akan datang.²¹

Dalam organisasi sektor publik seperti lembaga pendidikan, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi

¹⁹ Akdon dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 78

²⁰ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 258

²¹ Veithzal Rivai Zainal dan Fauzi Bahar, Islamic Education Management, (Jakarta: Raja Grafindo

sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dalam organisasi sektor publik, anggaran berperan dalam pengelolaan kekayaan lembaga yang tentunya juga ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, maka dari itu anggaran memiliki fungsi yang sangat penting. Anggaran juga merupakan hal yang sangat strategis karena dapat mengungkapkan apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga pendidikan.

Untuk penganggaran minimal ada dua format yang harus dilakukan yang pertama RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), biasa disebut RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAPP (Rencana Kegiatan Anggaran Pondok Pesantren); dan RAPB (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja), biasa disebut RAPBS (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah), RAPBM (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah), atau RAPBPP (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pondok Pesantren). Analisis penyusunan RKA dan RAPB memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern (SWOT) yang mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

2) Prinsip-prinsip Penganggaran

Shafritz dan Russell dalam bukunya yang berjudul *Introducing Public Administration* menyebutkan beberapa prinsip

penganggaran yang sudah mengacu pada perkembangan terakhir masyarakat, diantaranya adalah:²²

- a) Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran baik yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.
- b) Adil, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- c) Transparan, proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran negara yang harus diketahui oleh masyarakat umum.
- b) Bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan atau manajemen anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.
- c) Berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara hati-hati karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya.

²² Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga,

- d) Akuntabel, bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal.

3) Prosedur Penyusunan Anggaran

Terdapat prosedur yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam melakukan penyusunan anggaran. Adapun prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran;
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang;
- c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial;
- d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu;
- e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang;
- f) Melakukan revisi usulan anggaran;
- g) Persetujuan revisi usulan anggaran;
- h) Pengesahan anggaran.²³

²³ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan Cetakan I*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 50.

4) Bentuk Desain Anggaran

Menurut Nanang Fattah, adapun bentuk desain anggaran adalah sebagai berikut:

a) Anggaran Butir Per Butir (*Line Item Budget*)

Merupakan bentuk anggaran yang paling sederhana dan banyak digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah dan honor menjadi satu kategori atau satu nomor atau butir.

b) Anggaran Program (Program *Budget System*)

Merupakan bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Perhitungan anggaran didasarkan pada perhitungan dari masing-masing jenis program.

c) Anggaran Berdasarkan Hasil (*Performance Budget*) Merupakan bentuk anggaran yang menekankan hasil dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program.

d) Sistem Penyusunan Program dan Penganggaran (*Planning Programming Budgeting System*)

Merupakan sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam bentuk ini, setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.

b. Pelaksanaan Pembiayaan (*Accounting*)

Miftahol Arifin mengutip dalam Mulyasa bahwa pelaksanaan keuangan dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan pondok pesantren yang diperoleh dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Misalnya penerimaan dana dari SPP (*Sahriyah*) santri tercatat dalam Buku Penerimaan SPP (*Sahriyah*) serta ada bukti penerimaan berupa Buku Kartu SPP (*Sahriyah*) Santri yang dipegangsantri. Keduanya dilengkapi dengan Buku Administrasi Penyetoran dan Penerimaan SPP (*Sahriyah*). Selain itu bila pondok pesantren yang dimaksud memiliki donatur tetap maka perlu disediakan Buku Penerimaan Donasi.²⁴

²⁴ Miftahol Arifin, 10-11

Pada proses pelaksanaan selain buku-buku tersebut ada buku utama yang wajib diisi setiap terjadi transaksi, yaitu Buku KAS Umum. Buku KAS Umum ini yang menggambarkan history penerimaan dan pengeluaran dana pondok pesantren. Buku KAS Umum tersebut dilengkapi dengan dokumen Bukti KAS yang berupa kwitansi, faktur, nota, atau catatan administrasi lainnya. Salah satu Bukti KAS yang berupa catatan administrasi ialah Buku Honorarium dan Intensif Asatidz dan Staf (Pegawai).

Semua hal diatas yang berupa pendataan, pelaporan dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan juga bisa disebut dengan penatausahaan keuangan atau pembiayaan pendidikan. Penatausahaan keuangan atau pembiayaan pendidikan adalah kegiatan pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai program pendidikan dengan maksud agar diperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan.

1) Pendataan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Kegiatan ini meliputi identifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifikasian data keuangan, dan pelaporan data keuangan kepada pihak pengguna. Setiap transaksi keuangan pendidikan dicatat secara kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu dalam sebuah atau beberapa buku

yang disebut jurnal.²⁵ Tiap catatan harus ditunjang dengan dokumen keuangan seperti nota, faktur, kwitansi dan lain-lain. Satuan pengukur yang digunakan adalah satuan mata uang. Kegiatan yang tidak bisa diukur dengan uang tidak dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan karena tidak dapat diproses lebih lanjut.

Kemudian data keuangan digolongkan kedalam kategori tertentu agar penyajian dapat diringkaskan, misalnya semua pengeluaran untuk gaji atau upah pegawai dikelompokkan kedalam pos yaitu pos gaji atau upah. Kemudian dari pos tersebut digolongkan ke dalam suatu laporan yang berisikan informasi mengenai pos tersebut, hal ini disebut proses pencatatan dan pengikhtisaran transaksi.

Data keuangan yang sudah dicatat, dikelompokkan dan diikhtisarkan harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya laporan keuangan berguna dalam proses pengambilan keputusan.

2) Pembukuan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan disebut pembukuan.

²⁵ Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: Uin-Maliki Malang Press), 2016. Hal 69

Buku-buku yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu, buku kas umum skontro dan buku kas umum tabelaris.

Buku kas umum skontro merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan pencatatan semua bukti transaksi penerimaan dan pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan dalam pengelolaan anggaran yang sudah disediakan. Oleh karena masih bersifat sederhana, maka buku kas umum skontro harus dilengkapi dengan buku pembantu yaitu buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pengawas uang yang harus di pertanggungjawabkan, buku pembantu lainnya seperti buku pajak dan buku panjar kerja.

Buku kas umum tabelaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang terdiri dari banyak kolom, yang masing- masing kolom berfungsi sebagai buku pembantu seperti pada buku kas umum skontro.

c. Evaluasi Pembiayaan (*Evaluation/Auditing*)

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan proses mengevaluasi rangkaian proses pembiayaan pendidikan mulai tahap awal hingga tahap akhir pembiayaan pendidikan. Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam hal ini dikategorikan sebagai proses pertanggung jawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pendidikan.

Pertanggung jawaban keuangan pendidikan adalah aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah semua bukti pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau untuk instansi yang terkait.

Ketika membuat pertanggungjawaban keuangan pendidikan, beberapa hal penting harus diperhatikan yaitu:

- 1) Meneliti keabsahan bukti pengeluaran;
- 2) Menyusun pertanggungjawaban anggaran rutin dan anggaran pembangunan di luar SPP//DPP;
- 3) Menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana SPP/DPP;
- 4) Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan;

Selain evaluasi dan pertanggungjawaban, proses pengawasan juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan pendidikan agar segala kegiatan bersifat sistemik dan sistematis. sistemik dan sistematis.

Pola sistem pengawasan yang digambarkan diatas menunjukkan bahwa objek (input) pengawasan adalah kondisi riil dari kinerja (performance). Sementara yang menjadi tujuannya (output) adalah informasi yang tepat untuk bahan pelaporan kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijaksanaan berikutnya. Untuk

dapat mencapai tujuan ini diperlukan suatu proses kegiatan berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang, misalnya atasan langsung kepada bawahannya, atasan langsung meski tidak memiliki jabatan sebagai pengawas namun secara fungsional memiliki fungsi kepengawasan. Di Pondok Pesantren Pengawasan bisa dilakukan oleh Kepala Pondok Pesantren beserta jajarannya, Kepala Bagian Keuangan dan lain-lain. Selain itu pengawasan juga bisa dilakukan oleh orang atau pihak dari luar lembaga pendidikan, misalnya Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan dari pihak luar biasa disebut dengan Audit.

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyasa dalam Evaluasi Keuangan Sekolah, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah.²⁶ Pada keuangan manajemen pondok pesantren, Ketua Pengurus pondok pesantren perlu melakukan pengendalian

²⁶ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004), 63

pengeluaran keuangan pondok pesantren selaras dengan RAPB yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis-jenis Auditing:

1) Audit Laporan Keuangan

Audit ini bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

2) Audit Operasional

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Saat audit operasional selesai dilaksanakan, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi pondok pesantren.

3) Audit Ketaatan

Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah *auditi* (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

C. Kemandirian

Arti dari mandiri dapat dilihat dari dua segi, yaitu pengertian dari etimologi (bahasa) dan pengertian dari terminologi (istilah). Herman Holstein mengertikan kemandirian sebagai suatu sikap mandiri yang inisiatifnya sendiri mendesak jauh ke belakang setiap pengendalian asing yang membangkitkan swakarsa tanpa perantara dan secara spontanitas yakni ada

kebebasan bagi keputusan, penilaian, pendapat, pertanggung jawaban tanpa menggantungkan orang lain.²⁷ Drost memaparkan bahwa kemandirian (kematangan pribadi) sebagai suatu kondisi kesempurnaan dan keutuhan kedua unsur (budi dan akal) dalam kesatuan pribadi.²⁸ Dengan kata lain, manusia mandiri adalah pribadi dewasa yang sempurna. Umar Tirtaraharja dan Lasula juga memaparkan tentang konsep kemandirian bahwasanya belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar, mulai keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai kepada penemuan diri sendiri, apabila ia mengalami sendiri dalam proses perolehan hasil belajar tersebut.²⁹

Enung Fatimah mendefinisikan mandiri adalah berdiri diatas kaki sendiri dengan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung dengan orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.³⁰ Sedangkan Zakiyah Daradjat menjelaskan mandiri adalah:

Kecenderungan anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya tanpa minta tolong kepada orang lain. Juga mengukur kemampuannya untuk mengarahkan kelakuannya tanpa tunduk kepada orang lain. Biasanya anak yang berdiri sendiri lebih mampu memikul tanggungjawab, dan pada umumnya mempunyai emosi yang stabil.³¹

²⁷ Herman Holstein. Murid Belajar Mandiri. (Bandung: Remaja Rosdakarya 1986), 23

²⁸ J.I.G. Drost. Sekolah Mengajar atau Mendidik?, (Yogyakarta: Kanisius 2004), 39

²⁹ Umar Tirtaraharja dan Lasula. Pengantar Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta 2000), 50

³⁰ Fatimah, Enung. Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 141.

³¹ Daradjat, Zakiyah. Perawatan Jiwa Untuk Anak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) 130

Dalam hal ini Muhibbin Syah berpendapat bahwa belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.³² Menurut Slamet sebagaimana dikutip Syaiful Hadi Djamarah belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.³³

Senada dengan pengertian di atas Musthofa Fahmi sebagaimana dikutip Mustaqim belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan- perubahan tingkah laku atau pengalaman. Dengan kata lain yang lebih menghasilkan perubahan, berupa sesuatu yang baru berkenaan dengan aspek psikis dan fisik yang relatif bersifat konstan.³⁴

Menurut Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul Majid; "Belajar adalah proses perubahan dalam pemikiran siswa yang dihasilkan atas pengalaman terdahulu kemudian terjadi perubahan baru"

Sedangkan menurut Clifford T. Morgon berpendapat bahwa "*Learning defined as any relatively permanent change in behaviour which occurs as a result of experience or practice*". Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relative tetap sebagai akibat dari latihan dan pengalaman.

³² Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),.91

³³ Syaiful Bahri Djamarah. Psikologi Belajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 31

³⁴ Mustaqim. Psikologi Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). 34

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kemandirian adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang merupakan hasil dari pengalaman dan latihan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dalam bertingkah laku mempunyai kebebasan membuat keputusan, penilaian pendapat serta bertanggung jawab tanpa menggantungkan kepada orang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya menjadi tutunan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Metode penelitianlah yang menjelaskan mengenai prosedur atau langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merancang metode penelitian meliputi, (1) pendekatan dan jenis penelitian, (2) lokasi penelitian, (3) subjek penelitian, dan (4) teknik pengumpulan data, (5) analisis data, (6) keabsahan data, dan (7) tahapan penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang jenis datanya bersifat kualitatif, yaitu berupa pernyataan, kalimat, dan dokumen.³⁵

Peneliti memilih metode penelitian ini karena mampu mengumpulkan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi yang kompleks (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan beragam laporan terkait), serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian *deskriptif*. Karena penelitian ini bertumpu pada metode penelitian yang berkaitan dengan ilmu sosial. Selain itu, dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai pemahaman yang mendalam tentang kasus yang terkait dengan Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Menciptakan Kurikulum Berbasis Pesantren.³⁶

³⁵ Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2012), 15.

³⁶ John W. Cereswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), 135.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitiannya, lokasi penelitian bisa dilakukan dimana saja, seperti Lembaga Pendidikan, Lembaga pemerintah, tempat wisata dan lain sebagainya.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *purposive* dalam menentukan subjek penelitian. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu³⁷

Subjek penelitian yang dipilih sebagai berikut.

1. M. Masykuri selaku ketua III
2. A. Saifullah Naji selaku sekretaris umum
3. Abdul karim selaku bendahara I
4. H. Abdul Sa'dullah Abd. Alim selaku bendahara umum

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis mengenai perilaku dan proses kerja peserta didik, baik

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), 216.

secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan atau peneliti tidak ikut terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.³⁸ Peneliti akan menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak ikut dalam kegiatan yang akan di observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴¹

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.....197

³⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2001), 155.

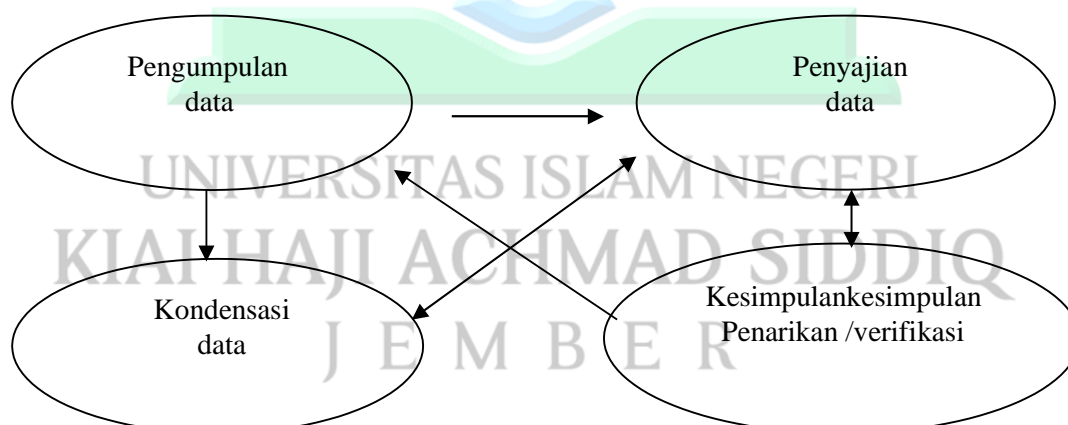
⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 233.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.....240.

Dokumentasi dibutuhkan untuk menguatkan data hasil penelitian dari observasi atau wawancara. Dokumentasi mendukung data dengan bukti-bukti yang berupa catatan harian, foto, file, dll.

E. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).⁴² Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci,



langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana akan diterapkan sebagaimana berikut:

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles dan Huberman.

⁴² M.B Miles, M. A Huberman, J Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (USA: Publications, 2014), 14.

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Kegiatan mengumpulkan dokumen sebagai sumber data yang diperlukan sebagai bahan dalam menghasilkan informasi sesuai dengan data yang diinginkan. Dalam kegiatan ini tentu saja termasuk pencatatan dari dokumen sehingga bisa diketahui jumlah dokumen yang tersedia dan memudahkan pencairan kembali dokumen tersebut jika diperlukan, sehingga *data collection* merupakan kumpulan atau keseluruhan data.

b. Kondensasi data (*Data condensation*)

Menurut Miles dan Huberman, "*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions*". Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1) *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan- hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.⁴³

⁴³ M.B Miles, M. A Huberman, J Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (USA: Publications, 2014), 18.

2) *Focusing*

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian.⁴⁴ Berdasarkan fokus penelitian ini yaitu :

- a) Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan yang diterapkan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam membangun kemandirian pesantren ?
- b) Bagaimana penerapan manajemen pembiayaan dalam Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?
- c) Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?

3) *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.⁴⁵

4) *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang

⁴⁴ M.B Miles, M. A Huberman, J Saldana, *Qualitative Data Analysis*...., 19.

⁴⁵ M.B Miles, M. A Huberman, J Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (USA: Publications, 2014), 19.

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.⁴⁶ Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data yang telah di dapat ke dalam tabel.

c. Penyajian data (*Data display*)

Data yang mengacu pada pengorganisasian secara sistematis menjadi satu kesatuan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan, sesuai dengan fokus penelitian

d. Kesimpulan, penarikan/verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*).

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan tahap selanjutnya.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid, dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat dipercaya kebenarannya oleh berbagai pihak. Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keshahihan keadaan data dalam suatu penelitian. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data, untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.⁴⁷

⁴⁶ M.B Miles, M. A Huberman, J Saldana, *Qualitative Data Analysis*...., 19.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*330

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk menguji redibilas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan teknik yang berbeda.⁴⁸

G. Tahapan Penelitian

Penelitian dapat dilakukan secara sistematis dengan mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan saat penelitian. Peneliti menyusun tahapan penelitian dan melaksanakannya agar dapat terlaksana secara sistematis.

1. Tahap pra penelitian lapangan

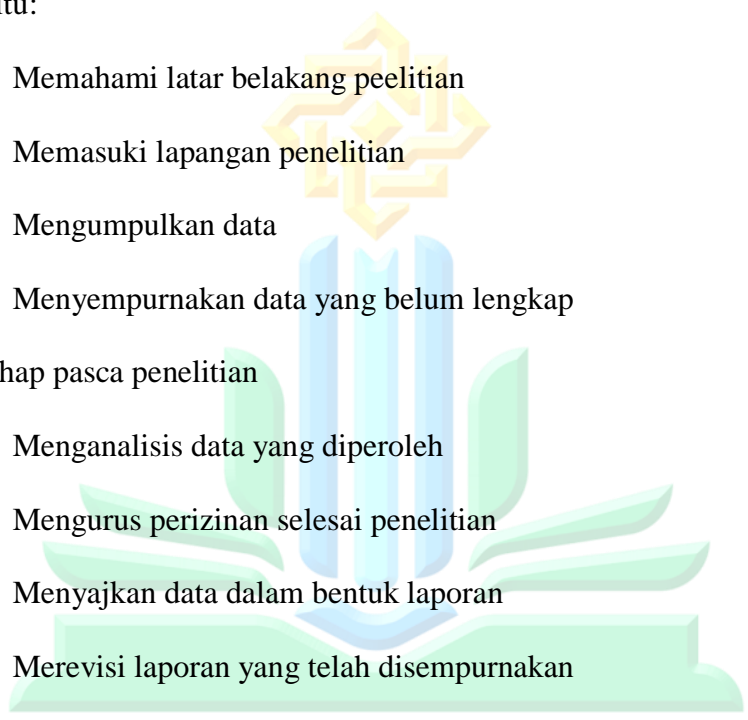
Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian pra-lapangan terdapat enam tahapan yang dilalui peneliti, diantaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menjajaki dan menilai lapangan
- d. Mengurus perizinan
- e. Menentukan informan
- f. Menyiapkan mental didi dan perlengkapan penelitian

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), 274.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap ini merupakan yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti, yaitu:

- 
- a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
- ## 3. Tahap pasca penelitian
- a. Menganalisis data yang diperoleh
 - b. Mengurus perizinan selesai penelitian
 - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
 - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENYAJIAN DATA

A. GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN SIDOGIRI

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Sidogiri

Pondok Pesantren Sidogiri adalah pondok pesantren (*tradisional*) yang memegang teguh terhadap ajaran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dalam aqidah, syariah dan akhlaq. Pondok pesantren Sidogiri dibangun dengan landasan taqwa sebagaimana landasan pembangunan masjid.

Banyak versi yang menyebutkan asal-usul nama SIDOGIRI, menurut sebagian riwayat, nama Sidogiri berawal ketika Sayyid Sulaiman mendapat titah dari penguas Giri untuk membabat tanah di daerah Pasuruan untuk dibangun sebuah pesantren. Tanah itu dikenal berbarakah dan mengandung segudang misteri. Beberapa ulama mencoba merintis pembangunan pesantren di tanah tersebut, namun semua gagal atau berakhir tanpa hasil. Karena mereka tidak mampu meredam gangguan makhluk halus yang menghuni tanah tersebut. Namun Sayyid Sulaiman ternyata mampu mengatasi gangguan makhluk-makhluk halus tersebut. Dikarenakan kesuksesannya menaklukkan makhluk-makhluk halus, Sayyid Sulaiman disebut "*Kang sido saking utusan Sunan Giri*", yang akhirnya menjadi nama SIDOGIRI.

Versi lain menyebutkan, bahwa nama SIDOGIRI diambil dari peristiwa kedatangan Sunan Giri (Penguasa Giri) ke tanah kanjengan Sidogiri. Dalam kunjungannya, Sunan Giri tidak membawa

masuk tongkat yang dibawanya. Tongkat yang dibawanya ditancapkan di suatu tempat di luar Sidogiri. Sepulang Sunan Giri menemui Kyai Sidogiri, tongkat yang ia bawa tertinggal, sehingga penduduk setempat mengatakan “*Sido kare tongkate Sunan Giri*”, yang berarti tertinggal sudah tongkatnya Sunan Giri. Lama-kelamaan tempat tersebut dikenal dengan sebutan SIDOGIRI. Setelah Sunan Giri teringat pada tongkatnya yang tertinggal, ia kembali lagi untuk mengambilnya. Namun tidak dinyana, terjadi peristiwa aneh ketika tongkat tersebut dicabut. Bekas cabutan tongkatnya memancarkan air bersih dan segar. Kemudian sumber air bersih tersebut dengan masyarakat sekitar dijadikan sumur. Dan sumur itu sampai sekarang masih tetap digunakan dan dilokasi tersebut sekarang dibangun BPS (*Balai Pengobatan Santri*) sebelah timur

Ada pula versi lain yang menceritakan bahwa kata “SIDOGIRI” berasal dari kata “Sayyid al-Qura” yang berarti tuan beberapa desa. Hal ini dikarenakan Sidogiri adalah tempat ulama-ulama besar, yang didatangi oleh para santri yang datang dari segala penjuru untuk belajar dan memperdalam ilmu-ilmu agama (al-Ulum al-Diniyah). Bahkan di masa perjuangan, Sidogiri dijadikan markas para pejuang kemerdekaan yang datang dari daerah-daerah lain

Berdasarkan catatan yang tertera dalam buku Pondok Pesantren Sidogiri: Suatu Penelusuran Hari Jadi Kabupaten Pasuruan, pondok pesantren Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada hari Selasa

Wage, 20 September 1712. Terhitung sejak awal pembabatan tanah Sidogiri. Sayyid Sulaiman berjuang menyebarkan Islam di daerah Sidogiri dan sekitarnya, hingga ia wafat pada tanggal 26 September 1766

Urutan pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri adalah sebagai berikut: 1) Sayyid Sulaiman, 2) KH. Aminullah, 3) KH. Mahalli, 4) KH. Noerhasan bin Noerkhotim, 5) KH. Bahar bin Noerhasan, 6) KH. Nawawie bin Noerhasan, 7) KH. Abd Adzim bin Oerip, 8) KH. Abd Jalil bin Fadlil, 9) KH. Cholil bin Nawawie, 10) KH. Sirajul Millah wa al-Din bin Nawawie, 11) KH. Abd Alim bin Abd Jalil, dan 13) KH. Nawawie bin Abd Jalil

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Sidogiri

Pondok Pesantren Sidogiri terletak di Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sekitar 12 km dari kota Pasuruan. Lokasi pesantren berdampingan langsung dengan pemukiman penduduk desa Sidogiri. Keberadaan pesantren memberikan berkah tersendiri terhadap warga desa Sidogiri dan sekitarnya yang banyak mendapat keuntungan dari berdagang berbagai kebutuhan santri. Pada masa kepemimpinan Sayyid Sulaiman, lokasi Pondok Pesantren Sidogiri berada di selatan sungai dan Sayyid Sulaiman telah membangun tiga bilik santri. Akan tetapi ketiga bilik tersebut ambruk akibat dirusak oleh jin. Kemudian pada masa kepemimpinan KH. Aminullah, lokasi pondok pesantren Sidogiri di pindah ke utara sungai karena di selatan sungai dinilai kurang strategis dan terpencil serta sangat rawan.

Sedangkan lokasi di selatan sungai dijadikan area pemakaman umum. Namun pada pertengahan tahun 1990-an, lokasi di selatan sungai dibeli kembali oleh pengurus Pondok Pesantren Sidogiri dan area pemakaman dipindahkan ke lokasi lain. Saat ini, lokasi selatan sungai dibangun gedung MMU al-Suyuthi, dapur umum, balai tamu, kantor pusat kopontren, unit kopontren, lapangan olah raga, gudang penyimpanan, dan jading.

3. Visi dan misi

Visi-Misi Pondok Pesantren Sidogiri adalah mencetak santri manjadi *Ibadillah al-Shalihin* (hamba Allah yang shaleh) serta menjadi santri hakiki, yaitu orang yang senantiasa berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

4. Struktur Organisasi

dalam struktur atau susunan organisasi Pondok Pesantren Sidogiri terdiri atas 3 koponen, yaitu: pengasuh (dibantu majelis keluarga), pengurus (sebagai tenaga pelaksana), dan santri/murid.⁴⁹

Adapun fungsi dan kedudukan dari masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pengasuh adalah pimpinan tertinggi dan bindak selaku pemegang kebijakan dan wewenang penuh terhadap langkah pondok pesantren.
- b. Majelis keluarga adalah suatu badan yang anggotanya terdiri dari cucu laki-laki KH. Nawawie bin Noerhasan dan berfungsi sebagai

⁴⁹ Saifullah Naji, Wawancara, 10 April 2023

tenaga pembantu pengasuh di dalam mempertahankan dan menetapkan landasan dasar untuk mewujudkan cita-cita pondok pesantren Sidogiri.

- c. Pengurus adalah suatu badan yang diangkat dan ditetapkan oleh pengasuh untuk masa jabatan tertentu dan berfungsi sebagai badan pelaksana program/kegiatan yang merupakan perwujudan dan penjabaran cita-cita dan tujuan Pondok Pesantren Sidogiri.
- d. Santri adalah orang yang terdaftar sebagai santri dan bermukim di dalam kompleks Pondok Pesantren Sidogiri. sedangkan murid adalah orang yang terdaftar sebagai murid atau pelajar yang belajar di MMU (Madrasah Miftahul Ulum) baik yang bermukim di pesantren maupun yang tidak bermukim. Murid MMU yang bermukim di pesantren disebut murid dakhili (murid dalam pesantren) sedangkan murid yang tidak bermukim di pesantren disebut murid khariji (murid luar pesantren).

5. Kepengurusan

Pengurus pondok pesantren Sidogiri terdiri atas pengurus harian dan pengurus pleno. Pengurus harian adalah mandataris majelis keluarga keluarga di dalam menjalankan tugas-tugas majelis keluarga di pesantren. Sedangkan pengurus pleno adalah badan pelaksana program/kegiatan di lapangan.

Pengurus harian berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada majelis keluarga dalam rapat bulanan yang diadakan setiap Jum'at Pon. Sedangkan pengurus pleno berkewajiban melaporkan kinerjanya kepada pengurus harian setiap bulan sekali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Adapun susunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri adalah sebagai berikut:

a. Susunan Pengurus Harian

Pengurus harian Pondok Pesantren Sidogiri terdiri atas:

- 1) Ketua Umum
- 2) Wakil Ketua Umum
- 3) Sekretaris Umum
- 4) Bendahara Umum
- 5) Ketua I
- 6) Ketua II
- 7) Ketua III
- 8) Ketua IV

b. Susunan Pengurus Pleno

Pengurus Pleno Pondok Pesantren

- 1) Semua Pengurus Harian
- 2) Sekretaris I
- 3) Sekretaris II
- 4) Sekretaris III
- 5) Sekretaris IV

- 6) Sekretaris V
- 7) Bendahara I
- 8) Bendahara II
- 9) Bendahara III
- 10) Ketua Kopontren
- 11) Kepala Batartama
- 12) Kepala Labsoma
- 13) Kepala Madrasah
- 14) Kepala LPBAA
- 15) Kepala Bagian Ketertiban dan Keamanan (Tibkam)
- 16) Kepala Daerah dari A sampai Z
- 17) Kepala bagian Ubudiyah
- 18) Kepala Bagian Ta'limiyah
- 19) Kepala Kuliah Syari'ah
- 20) Kepala Perpustakaan
- 21) Kepala TTQ
- 22) Kepala BPS
- 23) Kepala Bagian Kebersihan dan Kesehatan (Sihhat)
- 24) Kepala Bagian P3S
- 25) Kepala Bagian BPP
- 26) Kepala Pustaka Sidogiri
- 27) Kepala Urusan Guru Tugas dan Da'i.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Table 4.1
Dewan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan

No	Nama	Jabatan
1.	H. Baharuddin Thoyyib	Ketua Umum
2.	D. Nawawy Sa' doellah	Wakil Ketua Umum
3.	Saifulloh Naji	Sekretaris Umum
4.	H. Achmad Sa'dullah Abd. Alim	Bendahara Umum
5.	HM. Aminulloh Baqir	Ketua I
6.	H. Mahmud Ali Zain	Ketua II
7.	HM. Masykury Abdurrahman	Ketua III
8.	H. Nurhasan Ghazi	Ketua IV
9.	M. Syamsul Huda Mahfudz	Sekretaris I
10.	Utsman Husnan	Sekretaris II
11.	Tholhah Ma'ruf	Sekretaris III
12.	Rizal Khoironi	Sekretaris IV
13.	Sirojuddin	Sekretaris V
14.	H. Abdulloh Karim	Bendahara I
15.	Suudi Muhaimin	Bendahara II
16.	Edy Amin	Bendahara III
17.	HM. Baihaqi Juri	Ketua Kopontren
18.	Achyat Ahmad	Kepala Pustaka Sidogiri
19.	HM. Khudlori Abd. Karim	Kepala Batartama
20.	HA. Muna'ie Ahmad	Kepala Labsoma

21.	Kholilurrahman	Kepala MMU Ibtidaiyah
22.	Nasihin Khozin	Kepala MMU Tsanawiyah
23.	H. Abdul Qodir Ghufron	Kepala MMU Aliyah
24.	Syamsul Arifin Abu	Kepala LPBAA
25.	Rummanul Busthomi Kh	Kabag Tibkam
26.	Abdul Hannan	Kapala Daerah A
27.	Shofiyulloh Muhibbin	Kapala Daerah B
28.	Badrus Sholeh	Kapala Daerah C
29.	Mukhlis Efendi	Kapala Daerah D
30.	Abd. Ghufron Shomad	Kapala Daerah E
31.	M. Fauzan Hanafi	Kapala Daerah F
32.	Khotib Romli	Kapala Daerah G
33.	M. Muntahal Hadi	Kapala Daerah H
34.	M. Asy'ary Sutarjo	Kapala Daerah I
35.	Sufyan Faqih	Kapala Daerah J
36.	Moh. Yasir	Kapala Daerah K
37.	Faiq Dzulqarnain	Kapala Daerah L
38.	Umar Yandi	Kapala Daerah Z
39.	Nurhayyi	Kabag Ubudiyah
40.	Qusyairi Ismail	Kepala Kuliah
41.	M. Arifin	Kepala TTQ
42.	Ahyan Fadli	Kepala BPS

43.	Musafir Kholi	Kabag Sihhat
44.	H. Abdulloh Musthofa	Kepala BP3
45.	HM. Sholeh Abd. Haq	Kepala urusan GT & Da'i
46.	Ismail Sh. Arif	Kepala BPP

Table 4.2
Daftar Jumlah Santri Di Pondok Pesantren Sidogiri

NO	DAERAH ASAL	JUMLAH
1	Banyuwangi	138
2	Jember	577
3	Situbondo	205
4	Bondowoso	416
5	Lumajang	313
6	Probolinggo	768
7	Pasuruan	2014
8	Malang	417
9	Sidoarjo	118
10	Surabaya	479
11	Gresik	258
12	Bangkalan	1279
13	Sampang	782
14	sumenep	237
15	Pamekasan	286
16	Jawa barat	226
17	Jakarta dan banten	190
18	Jawa tengah	87

19	Sulawesi	95
20	Sumatra	157
21	Istimewa	137
22	Kalimantan	400
23	Bali	75
24	Luar negeri	50
TOTAL		10.090

6. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Sidogiri

Pondok pesantren Sidogiri merupakan lembaga pendidikan salafiyah (tradisional) yang lebih menitikberatkan kepada penguasaan materi-materi ilmu agama Islam (*al-Ulum al-Diniyah*). Ada beberapa sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu

a. Sistem Pendidikan Ma'hadiyah

Sistem pendidikan tradisional yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan bahkan cenderung ditingkatkan yaitu berupa pengajian kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning dengan menggunakan metode sorogan dan bandongan dengan pola halaqoh dalam proses pembelajarannya. Penerapan metode-metode ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempelajari dan memahami secara mendalam tentang isi kitab-kitab Islam klasik yang ditulis oleh ulama terdahulu meliputi bahasan tentang fiqh, usul fiqh, kaedah fiqh, tafsir, hadits, aqidah, tasawwuf dan akhlaq.

Di Pondok pesantren Sidogiri, pengajian kitab kuning dikoordinir oleh dua instansi yang berbeda yaitu TTQ (Ta'limiyah wa Tahfidz al-Qur'an) dan Kuliah Syariah.¹² Pengajian kitab kuning yang diasuh oleh para ustadz (santri senior) dikoordinir oleh TTQ. Sedangkan pengajian kitab kuning yang diasuh oleh kyai dikoordinir oleh Kuliah Syariah⁵⁰

Daftar pengajian kitab ma'hadiyah

No.	Nama Kitab	Kategori	Sistem
1	Ibnu 'Aqil	Nahwu	Bandongan
2	Riyadl al-Shalihin	Hadits	Bandongan
3	Kifayah al-Ashhab	Nahwu	Bandongan
4	Fath al-Mu'in	Fiqh	Sorogan
5	Tanwir al-Qulub	Fiqh	Bandongan
6	Sittin al-Mas'alah	Tauhid	Bandongan
7	Al-Asybah wa al-Nadzair	Qaidah Fiqhiyah	Bandongan
8	Sullam al-Taufiq	Fiqh	Bandongan
9	Nashaih al-'Ibad	Akhlaq	Bandongan
10	Sab'ah Kutub Mufidah	Fiqh	Bandongan
11	Fiqh al-Masail	Fiqh	Bandongan
12	Umdah al-Salik wa 'Iddah al-Nasik	Fiqh	Bandongan
13	Bahjah al-Wasail	Fiqh	Sorogan
14	Sullam al-Munajah	Fiqh	Bandongan
15	Risalah al-Mu'awanah	Tasawuf	Bandongan
16	Kasyifah al-Saja	Fiqh	Bandongan
17	Nur al-Dzalam	Tauhid	Bandongan
18	Riyadl al-Badi'ah	Fiqh	Bandongan
19	Mukhtashar Jiddan	Nahwu	Sorogan
20	Uqud al-Lujain	Akhlaq	Bandongan
21	Fath Rabb al-Bariyah	Nahwu	Bandongan
22	Fajr al-Shadiq	Fiqh	Bandongan
23	Minah al-Saniyah	Fiqh	Sorogan
24	Mukhtashar Abi Jamrah	Nahwu	Bandongan
25	Ihya' Ulum al-Din	Tasawuf	Bandongan

⁵⁰ Masykuri Abdurrahman, Wawancara, 14 April 2023.

26	Shahih Bukhari	Hadits	Bandongan
27	Al-Iqna'	Fiqh	Bandongan
28	Fath al-Wahhab	Fiqh	Bandongan
29	Mutamimah al-Jurumiyah	Nahwu	Bandongan
30	Tafsir Jalalain	Tafsir	Bandongan
31	Bidayah al-Hidayah	Akhlaq	Sorogan
32	Rahmah al-Ummah	Fiqh	Bandongan
33	Tanqih al-Qaul	Fiqh	Bandongan
34	Minhaj al-'Abidin	Tasawuf	Bandongan
35	Irsyad al-Ibad	Fiqh	Bandongan
36	Tausyih ala Ibn Qasim	Fiqh	Bandongan
37	Ayyuh al-Walad	Akhlaq	Bandongan
38	Nihayah al-Zain	Fiqh	Bandongan
39	Busyra al-Karim	Fiqh	Bandongan
40	Maraqi al-Ubudiyah	Tasawuf	Sorogan
41	Inarah al-Dujaa	Fiqh	Bandongan
42	Kifayah al-Akhyar	Fiqh	Bandongan
43	Tanbih al-Ghafilin	Tasawuf	Bandongan
44	Bughiyah al-Musyarsidin	Fiqh	Bandongan
45	Qurrah al-'Uyun	Fiqh	Bandongan
46	Al-Minhaj al-Qawim	Fiqh	Bandongan
47	Fath al-Majid	Tauhid	Bandongan
48	Fath al-Jawad	Fiqh	Bandongan
49	Al-Aufaq	Wird	Bandongan
50	Ushfuriyah	Hadits	Bandongan
51	Al-Risalah	Tasawuf	Bandongan
52	Daqaiq al-Akhbar	Sejarah	Bandongan
53	Qami' al-Thughyan	Tasawuf	Bandongan
54	Tafsir Yasin Hamami	Tafsir	Bandongan
55	Jam' al-Jawami'	Usul Fiqh	Bandongan
56	Irsyad al-Mu'minin	Fiqh	Bandongan
57	Washaya al-Aba'	Akhlaq	Bandongan
58	Al-Tibyan fi Hamalah al-Qur'an	Ilmu Tafsir	Bandongan
59	Washiyah al-Musthafa	Akhlaq	Bandongan
60	Anwar al-Masalik	Fiqh	Bandongan

b. Sistem Pendidikan Madrasah

Sistem persekolahan yang diadopsi dan dikembangkan adalah sistem pendidikan madrasah mulai dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Madrasah yang dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan ini 344 diberi nama Madrasah Miftahul Ulum (disingkat MMU).

Kurikulum yang dipergunakan adalah kurikulum pendidikan salafiyah (*tradisional*) yaitu kurikulum yang lebih menitikberatkan pada penguasaan materi-materi ilmu agama Islam (*al-Ulum al-Diniyah*) klasik seperti tata bahasa Arab (*nahwu*), sharraf, fiqh, akhlaq, tauhid, sejarah, tafsir, hadits, dan al-Qur'an. Kurikulum tersebut diterapkan di seluruh jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri yang meliputi MMU Ibtidaiyah,

MMU Tsanawiyah, MMU Aliyah, dan MMU Isti'dadiyah

1) Daftar kurikulum MMU Ibtidaiyah.

Kelas I

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Adzkar ash-Shalah
2	Tauhid	Menulis
3	Pendidikan Shalat	Fashalatan
4	Bahasa Arab	Madarij Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah
5	Bahasa Indonesia	Praktis
6	Matematika	Praktis
7	Tahsin al-Khath	Praktis

Kelas II

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Matn al-Safinah
2	Tauhid	Aqidah al-Awam
3	Tajwid	Hidayah ash-Shibyan
4	Tarikh	Tarikh al-Nabi
5	Akhlak	Al-Muntakhabat I
6	Bahasa Arab	Madarij Ta'lim al-Lughah al-
7	Bahasa Indonesia	Praktis
8	Matematika	Praktis
9	Tahsin al-Khath	Praktis

Kelas III

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Matn al-Safinah
2	Tauhid	Aqidah al-Awam
3	Tajwid	Hidayah ash-Shibyan
4	Tarikh	Khulashah Nur al-Yaqin I
5	Akhlak	al-Muntakhabat II
6	Bahasa Arab	Madarij al-Durus al-
7	Sharraf	al-Amtsilah at-Tashrif al- Ishthilahi
8	I'lal	Qawaid al-I'lal
9	Bahasa Indonesia	Praktis
10	Matematika	Praktis
11	Tahsin al-Khath	Praktis

Kelas IV

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Matn Sullam al-Taufiq
2	Tauhid	Nadzm Kharidah al-
3	Tajwid	Nadzm al-Jazariyyah
4	Tarikh	Khulashah Nur al-Yaqin
5	Akhlak	Taisir al-Khallaq
6	Bahasa Arab	Madarij al-Durus al-

7	Sharraf	al-Amtsilah at-Tashrif
8	Nahwu	Matn al-Ajurumiyah
9	I'lal	Qawaid al-I'lal
10	I'rab	Qawaid al-I'rab
11	Bahasa Indonesia	Praktis
12	Matematika	Praktis

Kelas V

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Fath al-Qorib al-Mujib
2	Tauhid	Al-Jawahir al-Kalamiyah
3	Tafsir	Tafsir al-Jalalain
4	Tarikh	Khulashah Nur al-Yaqin III
5	Akhlak	Al-Tahliyah wa al-Targhib
6	Bahasa Arab	Madarij al-Durus al-Arabiyyah III
7	Sharraf	Nadzm al-Maqsud
8	Faraid	Tuhfah al-Saniyah
9	I'rab	Tashil Nail al-Amani
10	Nahwu	Nadzm al-Imrithi

Kelas VI

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Fath al-Qorib al-Mujib
2	Tauhid	Matn Kifayah al-Awam
3	Tafsir	Tafsir al-Jalalain
4	Tarikh	Khulashah Nur al-Yaqin IV
5	Akhlak	Ta'lim al-Muta'alim
6	Bahasa Arab	Madarij al-Durus al-Arabiyyah IV
7	Balaghah	Durus al-Balaghah
8	Faraid	'Iddaf al-Faridl fi 'ilm al-Faraidl
9	Falak	Badi'ah al-Mitsal
10	Hadits	Matn al-Arbain al-Nawawi
11	Nahwu	Nadzm Alfiah Ibn Malik

Kelas PK-1

NO	Mata pelajaran	Materi
1	Fiqh	Sullam al-Taufiq & Fath al-Qorib al-Mujib
2	Tauhid	Al-Jawahir al-Kalamiyah & Kharidah al-Bahiyah
3	Tajwid	Nadzm al-Jazariyah
4	Tarikh	Khulashah Nur al-Yaqin I & II
5	Akhlak	Taisir al-Khallaq
6	Sharraf	Al-Amtsilah al-Tasrifiyah al-Lughawiyah
7	I'lal	Qawaid al-I'lal
8	Faraid	Tuhfah al-Saniyah
9	I'rab	Qawaid al-I'rab
10	Nahwu	Matn al-Ajurumiyah & Nadzm al-Imrithi

Kelas PK-2

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Fath al-Qorib al-Mujib
2	Tauhid	Matn Kifayah al-Awam
3	Tafsir	Tafsir al-Jalalain
4	Tarikh	Khulashah Nur al-Yaqin III & IV
5	Akhlak	Al-Tahliyah wa al-Targhib & Ta'lim al-Muta'alim
6	Sharraf	Nadzm al-Maqsud
7	Balaghah	Durus al-Balaghah
8	Faraid	'Iddaf al-Faridl fi 'ilm al-Faraidl
9	Falak	Badi'ah al-Mitsal
10	Hadits	Matn al-Arbain al-Nawawy
11	Nahwu	Nadzm al-Imrithi & Nadzm Alfiah Ibn Malik
12	I'rab	Tashil nail al-Amani

2) MMU Tsanawiyah

merupakan jenjang pendidikan lanjutan bagi murid yang telah tamat dari MMU Ibtidaiyah. MMU Tsanawiyah didirikan pada bulan Dzulhijjah 1376 atau bulan Juli 1957.

Program pendidikan di MMU Tsanawiyah secara normal ditempuh dalam jangka waktu 3 tahun. Namun demikian, terdapat program khusus yaitu sistem kelas ekslerasi yang dapat ditempuh hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Program khusus ini diperuntukkan bagi murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam menguasai materi pelajaran yang diajarkan di tingkat MMU Tsanawiyah.

Selain kegiatan pembelajaran di kelas, MMU Ibtidaiyah juga memprogramkan kegiatan-kegiatan di luar kelas atau kegiatan ekstrakurikuler yaitu: musyawarah (diskusi), kursus baca kitab dan kaderisasi ahl al-sunnah wa al-jamaah.

Disamping itu, lulus dalam melaksanakan tugas menjadi persyaratan pengambilan ijazah. Setelah kembali dari melaksanakan tugas, murid yang telah lulus diwajibkan kembali ke pesantren untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat aliyah.

Daftar kurikulum MMU Tsanawiyah

Kelas I

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Tuhfah al-Thullab
2	Tauhid	Umm al-Barahin
3	Tafsir	Tafsir al-Jalalain
4	Tarikh	Al-Khulafa' al-Rasyidun
5	Ilmu Akhlak	'Idzah al-Nasyiin
6	Ushul Fiqh	Qurrah al-'Ain bi Syarh Waraqat al-Haramain
7	Balaghah	Hilyah al-Lubb al-Mashun
8	Bahasa Arab	Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah
9	Falak	Durus al-Falakiyah
10	Hadits	Bulugh al-Maram
11	Nahwu	Nadzm Alfiah Ibn Malik
12	Qaidah Fiqh	Al-Farid al-Bahiyah
13	Ilmu Kesehatan	Kebersihan dan Kesehatan
14	Administrasi Pendidikan	Administrasi Pendidikan

Kelas II

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Tuhfah al-Thullab
2	Tauhid	Umm al-Barahin
3	Tafsir	Tafsir al-Jalalain
4	Tarikh	Al-Khulafa' al-Rasyidun
5	Ilmu Akhlak	'Idzah al-Nasyiin
6	Ushul Fiqh	Lubb al-Ushul
7	Balaghah	Hilyah al-Lubb al-Mashun
8	Bahasa Arab	Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah
9	Falak	Fath al-Rauf al-Mannan
10	Hadits	Bulugh al-Maram
11	Nahwu	Nadzm Alfiah Ibn Malik
12	Qaidah Fiqh	Al-Farid al-Bahiyah
13	Ilmu 'Arudl	Al-Mukhtashar al-Syafi
14	Ilmu Manthiq	Syarh Sullam al-Munawraq
15	Musthalahal-Hadits	Taqrirat al-Saniyah
16	Psikologi Pendidikan	Psikologi Pendidikan Anak Usia

Kelas III

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Tuhfah al-Thullab
2	Tauhid	Umm al-Barahin
3	Tafsir	Tafsir al-Jalalain
4	Tarikh	Al-Khulafa' al-Rasyidun
5	Ilmu Akhlak	'Idzah al-Nasyiin
6	Ushul Fiqh	Lubb al-Ushul
7	Balaghah	Hilyah al-Lubb al-Mashun
8	Bahasa Arab	Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah II
9	Falak	Fath al-Rauf al-Mannan
10	Hadits	Bulugh al-Maram
11	Nahwu	Nadzm Alfiah Ibn Malik
12	Qaidah Fiqh	Al-Farid al-Bahiyah
13	Ilmu Tafsir	Al-Iksir
14	Ilmu Manthiq	Syarh Sullam al-Munawraq
15	Musthalahal-Hadits	Taqrirat al-Saniyah
16	Dedaktik-Methodik	Dedaktik-Methodik

Kelas PK-1

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Tuhfah al-Thullab
2	Tauhid	Umm al-Barahin
3	Tafsir	Durus fi Tafsir ba'dli Ayat al-
4	Tarikh	Al-Khulafa' al-Rasyidun
5	Ilmu Akhlak	'Idzah al-Nasyiin
6	Ushul Fiqh	Qurrah al-'Ain & Lubb al-Ushul
7	Balaghah	Hilyah al-Lubb al-Mashun
8	Falak	Durus al-Falakiyyah & Fath al-Rauf
9	Hadits	Bulugh al-Maram
10	Nahwu	Nadzm Alfiah Ibn Malik
11	Qaidah Fiqh	Al-Farid al-Bahiyah
12	Musthalahal-Hadits	Taqrirat al-Saniyah
13	Ilmu Manthiq	Syarh Sullam al-Munawraq
14	Ilmu Kesehatan	Kebersihan dan Kesehatan
15	Administrasi Pendidikan	Administrasi Pendidikan

Kelas PK-2

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh	Tuhfah al-Thullab
2	Tauhid	Umm al-Barahin
3	Tafsir	Durus fi Tafsir ba'dli Ayat al-
4	Tarikh	Al-Khulafa' al-Rasyidun
5	Ilmu Akhlak	'Idzah al-Nasyiin
6	Ushul Fiqh	Qurrah al-'Ain & Lubb al-Ushul
7	Balaghah	Hilyah al-Lubb al-Mashun
8	Falak	Badi'ah al-Mitsal
9	Hadits	Bulugh al-Maram
10	Nahwu	Nadzm Alfiah Ibn Malik
11	Qaidah Fiqh	Al-Farid al-Bahiyah
12	Ilmu Manthiq	Syarh Sullam al-Munawraq
13	Ilmu 'Arudl	Al-Mukhtashar al-Syafi
14	Ilmu Tafsir	Al-Iksir
15	Dedaktik-Methodik	Dedaktik-Methodik

3) MMU Aliyah

merupakan jenjang pendidikan lanjutan bagi murid yang

telah lulus di tingkat tsanawiyah. MMU Aliyah didirikan pada 3 Muharram 1403 H atau 21 Oktober 1982 oleh KH. Abd Alim bin Abd Jalil

Kegiatan pembelajaran di MMU Aliyah dilaksanakan di pagi hari dari 11.50 sampai dengan 17.30 WIB. Sedangkan evaluasi hasil belajar dilaksanakan 3 bulan sekali atau 3 kali dalam satu tahun pelajaran⁵¹

Sebagai salah satu instansi yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren Sidogiri, tujuan pendidikan di MMU

⁵¹ Abd. Qodir Ghufron wawancara, 14 April 2023

Aliyah seiring dengan visi Pondok Pesantren Sidogiri yaitu membentuk insan yang shaleh (*Ibadillah al-Shalihin*)

Daftar kurikulum MMU Aliyah

Kelas I Umum

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh Syafi'i	Fath al-Mu'in
2	Fiqh Hanafi	Kanz al-Daqa'iq
3	Kebudayaan Islam	Wafa' al-Din
4	Tafsir	Muqtathafat al-Tafasir
5	Ilmu Akhlak	Fath al-Qarib al-Mujib
6	Ushul Fiqh	Ghayah al-Ushul
7	Balaghah	al-Balaghah al-Wadhihah
8	Tauhid	Syarh al-Hikam
9	Hadits	Tajrid al-Sharih
10	Nahwu	Kifayah al-Habib
11	Tarikh Tasyri'	Syariah Allah al-Khalidah
12	Musthalah al-Hadits	Al-Manhal al-Lathif
13	Ilmu Tafsir	Zubdah al-Itqan
14	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia I
15	Sosiologi	Pengantar Sosiologi
16	Ilmu Dakwah	Pengantar Ilmu Dakwah
17	Ilmu Jiwa	Pengantar Psikologi

Kelas II Aliyah

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Fiqh Syafi'i	Fath al-Mu'in
2	Fiqh Hanbali	Al-Umdah
3	Balaghah	al-Balaghah al-Wadhihah
4	Ilmu Akhlaq	Riyadl al-Shalihin
5	Ushul Fiqh	Ghayah al-Ushul
6	Tauhid	Syarh al-Hikam
7	Hadits	Tajrid al-Sharih
8	Nahwu	Kifayah al-Habib
9	Tarikh Tasyri'	Syariah Allah al-Khalidah
10	Musthalah al-Hadits	Al-Manhal al-Lathif
11	Ilmu Tafsir	Zubdah al-Itqan

12	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia I
13	Sosiologi	Pengantar Sosiologi

Fan khusus kelas II jurusan Tarbiyah

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Dedaktik	Tahriqat al-Tadris
2	Methodik	Siyasah al-Dirasah
3	Adm. Pendidikan	Al-Idariyah al-Tarbawiyah
4	Psikologi Pendidikan	Al-Ilmu al-Nafs al-Tarbawi
5	Media Pendidikan	Wasail al-Tarbiyah
6	Tafsir	Ayat al-Tarbiyah
7	Pengembangan	Kurikulum Berbasis Sekolah

Fan khusus kelas II Jurusan dakwah

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Kebudayaan Islam	Durus al-Tarikh al-Islami III
2	Psikologi Dakwah	Al-Insan wa al-Shihhah al-Nafsiyah
3	Dasar-dasar Dakwah	Ushul al-Dakwah
4	Metode Dakwah	Thariqat al-Dakwah
5	Tafsir	Ayat al-Dakwah

Fan Khusus II Jurusan Muamalah

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Pengantar Ilmu Ekonomi	Diktat Ilmu Ekonomi
2	Teori Ekonomi Mikro	Diktat Teori Ekonomi Mikro
3	Teori Ekonomi Makro	Diktat Teori Ekonomi Makro
4	Pengantar Ilmu Akuntansi	Diktat Ilmu Akuntansi
5	Pengantar Ilmu Koperasi	Diktat Ilmu Koperasi
6	Tafsir	Ayat al-Mu'amalah

Fan Khusus kelas III Jurusan tarbiyah

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	PBM	Proses Belajar Mengajar
2	Penelitian Pendidikan	Diktat Penelitian Pendidikan

3	Psikologi Perkembangan	Diktat Psikologi Perkembangan
4	Statistik	Diktat Statistik Pendidikan
5	Administrasi Pendidikan	Pedoman Administrasi Madrasah
6	Tafsir	Ayat al-Tarbiyah
7	Sosiologi Pendidikan	Diktat Sosiologi Pendidikan

Fan khusus kelas III jurusan dakwah

No.	Mata Pelajaran	Materi
1	Kebudayaan Islam	Durus al-Tarikh al-Islami IV
2	Psikologi Dakwah	Al-Insan wa al-Shihhah al-Nafsiyah
3	Media Dakwah	Wasail al-Dakwah
4	Tantangan Dakwah	Musykilat al-Dakwah
5	Jurnalistik	Pengantar Jurnalistik
6	Tafsir	Ayat al-Dakwah
7	Sosiologi Dakwah	Diktat Sosiologi Dakwah

B. Temuan Data

1. Perencanaan Manajemen Pembiayaan Yang Diterapkan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur Dalam Membangun Kemandirian Pesantren

Dalam membangun upaya kemandirian pesantren, hendaknya pesantren membuat sebuah perencanaan dan memenejemen semua kebutuhan pemasukan dan pengeluaran yang akan di gunakan utnu keperluan oprasional dan pengembangan pesantren. Hal ini sebuah langkah yang harus di ambil bagi pesantren untuk bisa bertahan dan berkembang dengan perkembangna zaman yang semakin cepat pertumbuhan perekonomiannya. Perencanaan diperlukan guna mengantisipasi terjadinya sebuah masalah yang tidak diinginkan. Berangkat dari hal ini peneliti melakukan wawancara dengan A. Saifullah

Naji selaku sekretaris Umum pondok pesantren sidogiri pasuruan. Berikut hasil wawancara dengan beliau.

“Perencanaan tentang anggaran pondok pesantren di sidogiri dilakukan pada rapat evaluasi program kegiatan dan realisasi anggaran tahun sebelumnya, rapat ini dilaksanakan setiap akhir tahun pada setiap bulan rajab. Rapat tersebut berisi mengenai evaluasi tentang program yang telah dijalankan selama satu tahun beserta realisasi keuangannya. Pada kegiatan rapat ini dilakuka dengann beberapa tahapan, pertama rapat ini mulai dilakukan disetiap setiap komisi yang dipimpin oleh masing-masing kordinator, setelah rapat pada tingkat kordinator selesai hasilnya akan dibawa kepada rapat pleno pada setiap bulan rajab. Pada rapat pleno semua pengurus harian dan pengurus pleno. Pada rapat pleno ini semua kegiatan, program selama satu tahun beserta realisasi keuangannya di pertanggung jawabkan dan di evaluasi. Dair rapat pleno tersebut pengurus akan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.”⁵²

Hal yang lain juga disampaikan oleh ustadz Abdul Karim selaku bendahara I pondok pesantren sidogiri pasuruan, berikut ini hasil wawancara dengan beliau;

“penetapan anggaran kegiatan dilakukan oleh tim perumus yang berjumlah 9 orang, pada sebelumnya tim yang telah dibentuk ini sudah menelaah dan mengkaji secara matang dan dapat dilanjut dengan anggaran yang di ajukan oleh masing-masing bidang beserta dana yang dibutuhkan. Dana yang diajukan bukan ketersediaan dana pesentren, malainkan untuk menumbuhkan semangat kerja maka dana yang akan diberikan menurut program yang direncanakan, jika dana pesantren dalam hitungan satu tahun anggarannya minus maka pesantren melalui bendahara mencari dana lain untuk menutupi kekurangan dana.”⁵³

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskna bahwa dalam penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran dilaksanakan pada tiap akhir tahun pada bulan rajab. Pada rapat ini juga membahas tentang evaluasi program kegiatan yang dijalankan selama satu tahun. Dan dari hasil

⁵² Saiful naji, wawancara, 10 April 2023

⁵³ Abdul karim, wawancara, 12 April 2023

evaluasi ini yang nantinya sebagai acuan untuk menentukan perencanaan program pada tahun berikutnya. Rapat evaluasi dilakukan bertahap dimulai dari tiap-tiap komite yang dipimpin oleh kordinator, hasil dari rapat tersebut akan dibawa kepada rapat pleno yang dihadiri oleh semua pengurus harian dan pengurus pleno. Untuk penetapan anggaran dibentuk sebuah tim Perumus yang berjumlah 9 orang yang bertugas untuk merumuskan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan hasil yang sama yaitu ada bentuk kegiatan rapat evaluasi program kegiatan yang telah terlaksana dalam satu tahun untuk dijadikan bahan evaluasi sebagai bahan anggaran pada tahun selanjutnya.⁵⁴



Gambar 4.1
kegiatan perencaann yang diawali dan digagas oelh pengurus harian dan kordinator dari berebagi bidang

⁵⁴ Observasi, Pasuruan, 20 April 2023

Pada penetapan program kerja beserta biaya operasional selama kegiatan yang akan dilaksanakan pesantren sidogiri membentuk tim khusus yang biasa disebut dengan Tim PERUMUS. Tim ini bertugas untuk merumuskan besaran anggaran yang akan ditentukan sebelum nantinya dibawa ke forum rapat pleno. Pendapatan pesantren sidogiri terbagi menjadi dua bagian seperti halnya yang dikatakan oleh Abdullah Karim selaku Bendahara I pondok pesantren sidogiri, berikut hasil wawancaranya:

“Sumber dana pendapatan pondok terbagi menjadi dua bagian yaitu; pendapatan langsung yang di himpun langsung oleh bendahara umum bendahara I dan bendahara II. Pendapatan langsung ini berasal dari Ganah masalah, SHU (Surplus Hasil Usaha) Kopontren, heregistrasi MMU (Madrasah Miftahul Ulum) uang pangkal murid LPBBAA dan santri baru, SHU pustaka sidogiri dan bulletin sidogiri, retribusi ikhtibar, pendapatan pengobatan umum BPS, hasil usaha pertanian dan penjualan kalender, pendapatan semua ini langsung dihimpun oleh bendahara umum, bendahara I, dan bendahara II. Sedangkan pada pendapatan tidak langsung bersumber dari dana pembangunan, MMU ranting, dana sosial, darul aitam, urusan guru tugas dan da’i, kopontren dan koperasi BMT UGT. Untuk sumber dana pendapatan tidak langsung ini dihimpun dan dikordinir langsung oleh masing-masing lembaga otonomi.”⁵⁵

Pada kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara kepada H. Achmad Sa’dulloh Abd. Alim selaku bendahara umum pondok pesantren sidogiri berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Sumber dana untuk kegiatan pondok ada yang dari spp santri dan kegiatan ekonomi pesantren sendiri. Kegiatan ekonomi sendiri bertujuan untuk memperkuat pondok pesantren dan meningkatkan diri dalam penyiapan fasilitas dan layanna terhadap santri dan masyarakat. Sumber belanja untuk kegiatan pondok yang dari SPP santri berkisar 20%-30%, selebihnya dari sumber lain yaitu usaha pondok pesantren

⁵⁵ Abdul karim, wawancara, 12 april, 2023

(kopontren, air minum pustaka, dan pertanian) dan ditambah juga usaha usaha yang lain. Dan ada juga pendapatan pondok dari kontribusi usaha yang dikelola oleh alumni seperti BMT masalah dan BMT UGT.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sumber dana dari pesantren sidogiri terbagi menjadi dua yaitu dana langsung yang di kelola oleh bendahara umum, bendahara I dan bendahara II, sedangkan dana tidak langsung dihimpun dan dikordinir oleh masing-masing lembaga Otonom. Penpatan langsung berasal dari I’anah masalah (iuran tahunan yang harus dibayah oleh santri, SHU (Surplus Hasil Usaha) Kopontren, Herregistrasi MMU (madrasah miftahul ulum), unng pangkal Murid LPBAA (lembaga pengembangan bahsa asing dan arab) dan santri baru, retribusi ikhtibar, SHU Pustaka sidogiri dan bulletin sidogiri, pendapatan pengobatan umum BPS, dan hasil penjualan kalender dan usaha pertanian. Untuk suber dana dari pendapatan tidak langsung dari dana pembangunan, urusan guru tugas dan da’I MMU ranting, darul Aitam sidogiri dan dana sosial angsuran kredit. Untuk persantse penggunaan dana kegiatan diambilkan dari spp santri sekitar 20% dan sisanya 80% dari kegiatan prekonomian pesantren.

Hasil obeservasi juga menunjukkan bahwa sektor prekonomian yang banya menjadi manjadikan pesantren dapat berkembang membiayai pesantren sendiri, hal ini menunjukkan bahwa pesantren sidogiri mampu berdikari dan berkembang dengan memanfaatkan dan mengolah pada

sektor perekonomian sehingga mampu mencukupi kebutuhan santri dan memperbanyak fasilitas dan kebutuhan santri.⁵⁶

Dapat disimpulkan dari hasil temua wawancara dan observasi diatas mengenai perencanaan pembiayaan yang ada di pondok pesantren sidogiri yaitu: pembahasan perencanaan anggaran dirapatkan pada tiap tahun pada bulan rajab, diawali dengna rapat evaluasi program kegiatan dan program pengadaan yang telah direalisasikan pada tahun sebelumnya dan dilanjut kepada rapat pleno. Kedua, dana untuk program kegiatan dan fasilitas bersumber dari pendapatan langsung dan pendapatan tidak langung

2. Penerapan Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Di Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur Dalam Membangun Kemandirian Pesantren

Proses memanajemen anggaran sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan hati-hati, menyertakan dasar dari hasil keputusan menjadi sangat penting untuk dilakukan terutama dalam merumuskan sebuah anggaran keuangan yang akan dilakukan, dalam proses penyusunan anggaran yang terjadi di pondop pesantren sidogiri diawali dengna diadankannya rapat evalusi program kegiatan yang telah bejalan, rapat ini diadakan pada bulan rajab dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kegiatan program yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Hasil evalusi tersebut yang nantinya akan melahirkan program kerja pada tahun berikutnya, seperti halnya yang dikatakan oleh A. Saifulloh

⁵⁶ Observasi, pasuruan, 20 april 2023

Naji, selaku sekretaris umum pondok pesantren sidogiri, berikut ini petikan wawancara dengan beliau;

Penyusunan anggaran di pondok pesantren sidogiri dimulai dari rapat evaluasi yang diadakan setiap akhir tahun menjelang bulan rajab, rapat ini membahas dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus selama satu tahun pelajaran. Selain mengevaluasi program yang telah dilaksanakan rapat evaluasi juga membahas dana pesantren yang telah digunakan. Dari hasil rapat ini nantinya kita akan mengetahui programnya telah berjalan, kurang maksimal, atau gagal dalam penerapannya perlu untuk diperhatikan untuk di ambil sikap. Dari hasil rapat evaluasi ini yang akan menentukan program kegiatan dan besar anggaran yang akan dikeluarkan untuk program kegiatan tahun depan.⁵⁷

Saifulloh Naji juga menjabarkan keterangan mengenai pelaksanaan perencanaan anggaran yang ada di pesantren sidogiri.

Setelah rapat evaluasi selesai dilanjutkan dengan rapat pleno yang kedua yang diadakan setiap bulan sya'ban. Pada rapat pleno disini akan membahas khusus terkait program kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Dirapat ini juga membahas kisaran besar anggaran yang akan digunakan. Setelah selesai hasil pembahasan pada rapat pleno kedua dibawa kepada rapat pleno ketiga yang diadakan pada bulan ramadan. Rapat pleno ketiga ini membahas hasil rapat pleno yang kedua untuk menetapkan program kegiatan dan sekaligus menetapkan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja). Rapat tersebut hanya dihadiri oleh PERUMUS, jadi penetapan anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren ditetapkan pada akhir rapat yang dilaksanakan oleh tim perumus dan diadakan setiap bulan ramadan dari tanggal 3 sampai 18.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran dilakukan dimulai dengan rapat evaluasi yang dilakukan pada bulan rajab, hasil dari rapat evaluasi akan dilanjutkan pembahasannya kepada rapat pleno yang kedua. Pada

⁵⁷ Saifulloh Naji, wawancara, 10 April 2023

⁵⁸ Saifullah naji, wawancara, 12 april 2023

rapat pleno kedua ini membahas tentang program kegiatan dan kisaran anggaran untuk dijalankan pada tahun berikutnya. Hasil dari rapat pleno kedua dibawa kepada rapat pleno ke tiga yaitu tentang penetapan program kegiatan dan besaran anggaran yang akan di tetapkan, pada rapat pleno ketiga hanya dihadiri oleh PRUMUS yang beranggotakan pengurus harian, pengurus inti pondok pesantren sidogiri dan perwakilan dari masing-masing lembaga unit kegiatan dan panitia.

Penetapan anggaran pondok pesantren sidogiri dilakukan oleh tim PERUMUS yang terdiri dari majelis keluarga pondok pesantren sidogiri, pengurus harian serta perwakilan dari masing-masing unit kegiatan dan panitia, pimpinan sidogiri meminta kepada semua pimpinan lembaga untuk mangjukan semua usulan program kerja pada rapat evaluasi seluruh kegiatan, beserta kisaran besar anggaran yang aka dibutuhkan dalam program baru atau program lanjutan yang akan dilaksanakan.

Dalam penggunaan dan anggaran dipondok pesantren sidogiri di perioritaskan untuk kegiatan oprasional madrasah, kesejahtraan guru dan pegawai, peningkatan kualitas guru dan pegawai, pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana, pembayaran jasa dalah hal ini peneliti melakukan wawancara dengan M. Masykuri abdurrahman selaku ketua III dipodok pesantren sidogiri, berikut ini hasil wawancara dengan beliau;

“Dana pondok pesantren itu digunakan untuk kegiatan oprasional madrasah kesejahtraan guru, peningkatan kualitas guru, kesehatraan pegawai, pembangunan, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pembayaran jasa, dan untuk keperluan sosial. Tetapi yang mejadi prioritas utama adalah untuk kegiatan oprasional madrasah atau

berkaitann langsung dengan pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren sidogiri.”⁵⁹

Pada kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara kepada Achmad Sa’dulloh selaku bendaha umum pondok pesantren sidogiri, terkait alur proses pencairan dana anngaran yang akan di gunakan sebgai program kegiatan. Berikut ini petiian wawancaranya dengan beliau;

Prosesi awal pancairan dana anggaran belanja pondok pesantren yaitu, kepada pelaksana program harus mengidentifikasi kebutuhan belanja, kemudian mengambil belangko NPU (Nota Pencairan Uang) dan SPJ (Surat Penanggung Jawab) dikantor sekretariat. Setelah itu pelaksana program memasukkan atau menginput daftar kebutuhan belanja, dan menyerahkan NPU kepa kordinator untuk di verivikasikan ditanda tangani. Apabial NPU tersebut sesuai dan disetujui oleh kordinator, maka NPU ditandatangani oleh kordinator. Tapi apabila tidak sesuai maka NPU dikembalikan kembali untuk dilakukan pengecekan ulang. Setelah NPU ditanda tangani oleh kordinator kemudian diserahkan kepada ketua umum untuk ditanda tangani dan ketua umum menerbitkan SPMU (Surat Perintah Mencairkan Uang), lalu diberikan kepada bendahara umum utnuk melakukan pencairan uang⁶⁰

Hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Saifullah Naji selaku sekertaris umum pondok pesantren sidogiri, berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Pencairan dana pada pondok pesantren sidogiri harus melalui beberapa tahap prosedur diantaranya ketika pemohon mengajukan program kegiatan harus ada laporan kebutuhan belanja, kemudian pemohon mengambil NPU dan SPJ di kantor sekretariatan, setelah selesai mengambil NPU dan SPJ pemohon mulai menginput daftar kebutuhan yang berhubungan dengan program kegiatan dan menyerahkan NPU kepada kordinator untuk melakukan verivikasi, apa bial ada ketidak cocokan atau kesalahan maka si pemohon disarankan untuk megecek ulang. Setelah NPU ditandatangani oleh kordinator lemudian diserahkan kepada ketua umum untuk ditandatangani dan ketua umum memberikan SPMU kepada pemohon, kemudian NPU dan SPMU diserahkan kepada bendahara umum untuk untuk

⁵⁹ M. Maskyuri, wawancara, 12 april 2023

⁶⁰ Achmad sa’dullah, wawancara, 15 April 2023

mencairkan dana. Untuk mencairkan dana selanjutnya pemohon harus menyelesaikan dan menyerahkan SPJ penggunaan dana kepada bendahara umum.”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan alur pencairan dana untuk program kegiatan yang akan dilaksanakan malalui beberapa tahapan diantaranya:

- a. Pengambilan dana anggaran belanja dilakukan oleh pimpinan lembaga pelaksana program kerja yang telah di verivikasi oleh kordinator
- b. Pengambilan dana anggaran kerja harus sesuai dengan buku PK (program Kerja dan Buku APB PPS (anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren sidogiri)
- c. Anggaran dana yang akan dicairkan harus sesuai dengna NPU yang diajukan oleh pimpinan lembaga yang telah melewati tahapan prosedur.
- d. Kesekretariatan menirbitkan NPU dan SPJ sebagai tanda bahwa tahapan prosedur yang sebelumnya telah di lalui dan telah diverivikasi
- e. Ketua umum menerbitkan SPMU (surat perintah mencairkan uang) yang telah di tanda tangani oleh ketua umum sebagai tanda bukti persetujuan kebutuhan dana sebagai program kegiatan yang akan dilkuakan
- f. NPU dan SPJ diberikan kepada bendahara umum untuk melakukan pencairan dana yang telah di stujui oleh ketua umum untuk program kegiatan yang akan dilaksanakan.

⁶¹ Saiful naji, wawancara, 10 April 2023

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan dalam pelaksanaan mekanisme pencairan dana program kerja dilakukan dengan cara bertahap. Proses pelaksanaan yang bertahap ini menggambarkan bahwa dana yang akan diberikan memang telah sesuai dengan program kegiatan dan keperluan belanja yang telah di anggarkan, keseriusan pihak pesantren dalam mengelola pengeluaran uang merupakan langkah yang diambil untuk mendistribusikan dana dengan tepat untuk kepentingan perkembangan pesantren dan para santri.⁶²



Gambar 4.2
pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi dan rapat pleno terkait tentang pembahasan evaluasi program dan pembuatan rancangan program

Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan untuk keperluan pesantren dilakuakn dengan rinci dan detail sehingga alokasi dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tepat untuk kepentingan perkembangan pesantren dan para santri. Bagitupun juga pada mekanisme pengadaan barang dan pembayaran jasa, hal ini harus dimanajemen dan

⁶² Observasi. Pasuruan, 20 April 2023

diatur secara ketat untuk meperkecil kemungkinan terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Saifullah Naji selaku sekertaris umum di pondok pesantren sidogiri, berikut ini petikan wawancara dengan beliau;

Intinya penggunaan dana AB dibagi menjadi dua yaitu digunakan sebagai pembelian barang dan pembayaran jasa. Untuk setiap pembelian barang harus menyertakan tandabukti berupa kuitansi, nota atau faktur yang berstempel dari toko atau dari penyedia jasa atau barang. Barang yang memiliki fungsi pakai langsung dan berumur ekonomis lebih dari 1 tahun harus dimasukkan dan di catat dibuku inventaris seperti kursi, meja dan seterusnya. Sengakan barang yang tidak dapat digunakan secara langsung (perlu di olah terlebih dahulu) akan dimasukkan dalam buku inventaris tidak tetap. Untuk pembyaran jasa harus menunjukkan bukti bukti pembayaran berupa kuitansi atau daftar pembeyaran yang tercatat didalam buku dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jika melakukan pembiayaan berupa kegiatan diklat, kepanitian, kursus dan training dan seterusnya maka harus menyertakan berita acara pelaksanaan (BAP).”⁶³

Pada kesempatan lain peneliti juga melakun wawancara kepada Achmad Sa’dulloh selaku bendahara umum pondok pesantren sidogiri, berikut hasil wawancara dengan beliau;

“Untuk penggunaan dana bagi pembelian barang harus menyertakan nota, atau kwitansi pembelian yang telah diberi stempel toko atau jasa barang, sedangkan dana untuk keperluan pembayaran jasa harus menyertakan bukti pembayaran jasa berupa kwitansi atau daftar pembayaran yang bertandatangan dari penerima. Mekanisme seperti ini diterapkan supaya kita tau secara menyeluruh anggaran dana itu dialokasikan untuk apa saja, kwitansi dan struk pembayaran juga digunakan sebagai bentuk pelaporan evaluasi yang diadakan pada tiap akhir tahun menjelang bulan rajab.”⁶⁴

⁶³ Saiful naji, wawancara, 10 April 2023

⁶⁴ Achmad sa’dullah wawancara, 15 April 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui anggaran yang diberikan untuk pengadaan barang dan pembayaran jasa pengurus memberikan peraturan berupa meyetorkan bukti pembelian barang berupa kuitansi, nota, atau faktur yang berstempel lunas dari toko atau dari tempat jasa barang. Untuk pembayaran berupa jasa harus menyetorkan bukti kwitansi pembayaran atau penerima memberikan tanda tangan pada daftar buku pembayaran. Menanisme ini diterapkan untuk mengetahui secara detail alokasi dana yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah dilampirkan, disamping itu juga sebagai bentuk pelaporan bukti untuk evaluasi tiap tahunnya.

Hasil observasi yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme bukti pembelian barang atau jasa diatur dengan detail dan ketat. Mekaniame ini diterapkan untuk mepermudah tranparansi dana yang telah digunakan untuk keperluan pondok pesantren sidogiri. Dalam pebukuan anggaran dana telah tersusun dan teridentifikasi secara baik terkait barang-barang yang telah dibeli.⁶⁵

⁶⁵ Observasi, pasuruan, 20 april 2023



Gambar 4.3
Nota Pembelian Dan Pembukuan Pengeluaran Dan Pemasukan

Dapat disimpulkan pada hasil temuan di atas bahwasannya penerapan manajemen pembiayaan pesantren sidogiri menerapkan beberapa mekanisme diantaranya dalam pengadaan dana program kegiatan dalam pembiayaannya harus melwati beberapa tahapan yaitu;

- a. Pengambilan dana dilakukan oleh pimpinan lembaga yang telah mendapatkan verifikasi kordinator lembaga
- b. pencairan dana harus sesuai dengan buku PK (Program Kerja) dan buku APB PPS (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pondok Pesantren Sidogiri)
- c. anggaran dana yang dicairkan harus sesuai dengan NPU
- d. Kesekretariatan menirbitkan NPU dan SPJ sebagai tanda bahwa tahapan prosedur yang sebelumnya telah di lalui dan telah diverivikasi
- e. Ketua umum menerbitkan SPMU (surat perintah mencairkan uang) yang telah di tanda tangani oleh ketua umum sebagai tanda bukti

persetujuan kebutuhan dana sebagai program kegiatan yang akan dilakukan

- f. NPU dan SPJ diberikan kepada bendahara umum untuk melakukan pencairan dana yang telah di stujui oleh ketua umum untuk program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk manajemen mekanisme pembiayaan pengadaan barang dan pembayaran jasa, harus melampirkan kwitansi, nota, faktur yang berstempel dari toko atau jasa barang pada setiap transaksi yang telah dilakukan, untuk pekmbayaran jasa harus ada bukti pembayaran berupa struk, kwitansi atau tanda tangan penerima pada daftar buku pembeyaran. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan bahan evaluasi kepada pengurus pondok pesantren sidogiri untuk melihat pengalokasiaan dana benar-benar sudah tepat.

3. Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan Pesantren Sidogiri Pasuruan

Evaluasi merupakan keharusan yang harus dilakukan dalam sebuah lembaga atau organisasi, karena evaluasi akan berperan terhadap kemajuan perkembangan lembaga. Evaluaisi manajemen pembiayaan dipondok pesantren sidogiri juga akan membantu dalam hal pengawan secara sistem dan transparansi kepada dana yang telah digunakan untuk keperluan lembaga pondok pesantren. Hal ini juga membantu untuk memastikan bahwa sumber daya yang diterima digunakan dengan tepat sesuai dengann tujuan pesantren. Pada kesempatan kali ini peneliti mendapatkan hasil

wawancara dari Achmad Sa'dulloh selaku bendahara umum pondok pesantren sidogiri, berikut ini hasil wawancara dengan beliau;

“Untuk masalah hal audit keuangan, pengurus pesantren melaporkan hasil keseluruhan pengeluaran dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahunan. Pertemuan tahunan ini dihadiri oleh semua pengurus pesantren, semua pengurus pesantren dikumpulkan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah keuangan pesantren dan di ikutsertakan dengan diberikan buku laporan pertanggung jawaban.”⁶⁶

Peneliti juga mendapatkan lain dari bapak Saiful Naji sekali sekertaris umum pondok pesantren sidogiri, berikut hasil wawancara dengan beliau;

“Pada tiap tahun kita mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh semua pengurus, tujuan dari pertemuan tersebut adalah melakukan eudit dan evaluasi dari tugas-tugas bendahara umum sebagai penanggung jawab pesantren benar-benar terbuka dan jujur tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan semua pengurus dapat bertanya langsung mengenai proses keluar masuknya dana yang telah diperoleh dan dana yang telah di alokasikan sesuai dengan anggaran dana yang telah disepakati secara bersama. Semua hasil laporan tersebut telah dibuat dan siap untuk digandakan sebagai bahan bagi pengurus yang lain untuk dicek kebenaran dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam laporan tersebut.”⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam evaluasi penerapan manajemen pembiayaan pondok pesantren sidogiri, pengurus melakukan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang diadakan setiap tahun. Petemuan ini membahas tentang laporan keuangan dana yang diperoleh dan pengalokasian dana keluar yang dilaksanakan pada satu tahun kepengurusan. Hal ini merupakan kegiatan rutinan yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren sidogiri sebelum menentukan anggaran belanja selanjutnya.

⁶⁶ Achmad sa'dullah, wawancara, 25 april 2023

⁶⁷ Saiful Naji, wawancara, 10 April 2023

Hasil observasi yang didapatkan peneliti juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil wawancara, sistem evaluasi seperti ini dilakukan untuk mengetahui transparansi anggaran dana yang telah diperoleh dan dialokasikan. Kejujuran dan keterbukaan juga menjadi sebuah contoh bagi pengurus lainnya ketika seseorang diberi amanat untuk mengelola sesuatu hendaknya mempertanggung jawabkan segala tugas dan tanggung jawabnya.⁶⁸



Gambar 4.3
kegiatan pembukaan laporan tahunan (LPJ) yang diselenggarakan oleh pengurus kepada pimpinan pondok pesantren

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan temuan data yang telah didapatkan oleh peneliti maka peneliti akan melakukan pembahasan hasil temuan dengan teori yang telah ada dan menginterpretasikan antara hasil temuan dalam bentuk penelitian kajian pustaka yang relevan. Dapat dijelaskan pada tema penelitian dalam skripsi ini tentang

⁶⁸ Observasi, Pasuruan, 20 April 2023

penerapan manajemen pembiayaan dalam pesantren sidogiri untuk membangun kemandirian pesantren.

Adapun fokus penelitian dalam pembahasan tesis ini akan lebih dirinci sebagai berikut:

1. Perencanaan manajemen pembiayaan yang diterapkan pesantren sidogiri pasuruan dalam membangun kemandirian pesantren.

dari hasil temuan yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dijelaskan bahwa perencanaan manajemen pembiayaan pondok pesantren untuk membangun kemandirian pesantren disidogiri melalui rapat pembahasan perencanaan yang dilakukan pada tiap tahun menjelang bulan rajab. Rapat ini membahas tentang anggaran yang akan ditentukan untuk menjalankan program baru atau program klanjutan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Berdasarkan hasil temuan data wawancara diatas dijelaskan dalam penyusunan perencanaan penentuan anggaran untuk pembiayaan pesantren dilakukan dengan 2 kegiatan, kegiatan yang pertama adalah dengan diadakannya rapat evaluasi kegiatan yang telah terlaksana ditahun sebelumnya. Dan kegiatan yang kedua adalah rapat pleno yang dilakukan dewan pengurus dan pengurus harian. Untuk rapat pleno sendiri pengurus melaksanakannya sebanyak dua kali, pleno pertama untuk membahas hasil evaluasi dan pleno kedua untuk membahas rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran, sedangkan *budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang diinginkan untuk waktu tertentu⁶⁹. Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan untuk program yang telah disusun untuk kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana tersebut dihabiskan. Dengan rancangan yang demikian fungsi anggaran sebagai alat pengendalian akan dapat di efektifkan.⁷⁰

Hasil temuan data peneliti dengan teknik wawancara, menunjukkan keselarasan dengan teori yang telah di definisikan oleh para ahli, bahwa penyusunan anggaran (*budgeting*) merupakan langkah positif untuk merealisasikan penggunaan pembiayaan pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan sebuah negosiasi atau perundingan atau kesepakatan yang dilakukan oleh pimpinan dengan bawahannya untuk menentukan besaran alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan, hal ini juga di terapkan pada pondok pesantren sidogiri karena melibatkan pimpinan-pimpinan dari masing-masing unit lembaga organisasi.

⁶⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), 258

⁷⁰ Mulyono, Konsep pembiayaan Pendidikan, (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 89

2. Penerapan Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Di Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur Dalam Membangun Kemandirian Pesantren

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti ketika melakukan wawancara dan observasi di lapangan dapat dijelaskan bahwa dana pondok pesantren digunakan untuk kegiatan operasional madrasah, kesejahteraan guru, peningkatan kualitas guru, kesejahteraan pegawai, pembangunan, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pembayaran jasa, dan keperluan sosial. Tapi yang menjadi prioritas utama adalah kegiatan operasional madrasah atau yang berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan di pondok pesantren.

Dalam pengambilan anggaran dana pengurus juga memberikan aturan dan tahapan dalam pengambilannya diantaranya:

- a. Pengambilan dana anggaran belanja dilakukan oleh pimpinan lembaga pelaksana program kerja yang telah di verifikasi oleh kordinator
- b. Pengambilan dana anggaran kerja harus sesuai dengan buku PK (program Kerja dan Buku APB PPS (anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren sidogiri)
- c. Anggaran dana yang akan dicairkan harus sesuai dengan NPU yang diajukan oleh pimpinan lembaga yang telah melewati tahapan prosedur.
- d. Kesekretariatan menirbitkan NPU dan SPJ sebagai tanda bahwa tahapan prosedur yang sebelumnya telah di lalui dan telah diverifikasi

- e. Ketua umum menerbitkan SPMU (surat perintah mencairkan uang) yang telah di tanda tangani oleh ketua umum sebagai tanda bukti persetujuan kebutuhan dana sebagai program kegiatan yang akan dilkuakan
- f. NPU dan SPJ diberikan kepada bendahara umum untuk melakukan pencairan dana yang telah distujui oleh ketua umum untuk program kegiatan yang akan dilaksanakan.
- g. Segala bentuk pengeluaran harus menyertakan nota, kuritansi, dan faktur yang bersempel dari toko atau jasa barang yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan kegiatan ke dua adalah pembukuan (*Accounting*). *Accounting* adalah proses pencatatan, pengelompokan dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.⁷¹ Pebukuan anggaran, baik penerima atau pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Pembukuan yang benar dan tertib akan mudah diketahui perbandingan antara proyek baik fisik maupun sumber daya manusia.⁷²

Kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh pondok pesantren sidogiri telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para bahwa dalam kegaitan pembukuan hendaknya dilakukan dengan cara yang tertib, teratur dan benar sehingga mudah untuk diketahui antara proyek baik fisik

⁷¹ Tim dosen administrasi Pendidikan UPI, manajemen pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), 265

⁷² Bharuddin dan Moh. Makin, manajemen Pendidikan Islam, (malang: UIN Maliki Press, 2012), 88

maulun sumberdaya manusia. Disamping itu dalam penerapan pelaksanaannya pembukuan juga telah disajikan dalam bentuk yang teratur dan logis.

3. Evaluasi Manajemen Pembiayaan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur

Hasil temuan peneliti dengan teknik wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa dalam evaluasi pembiayaan pesantren sidogiri pengurus melakukan laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahunan. Semua pengurus yang mempunyai keterkaitan dengan keuangan peasantren diikut sertakan dengan diberikan buku laporan pertanggung jawabn tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pelaporan keuangan yang akan dilakukan bendahara terkait dana yang masuk dan keluar dengan penuh tanggung jawab, terbuka, jujur tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, dan semua pengurus dapat bertanya terkait permasalahan keuangan.

Kegiatan ketiga dari manajemen pembiayaan dikenal dengan istilah auditing yang memiliki pengertian kegiatan pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak pihak yang berwenang.⁷³ Auditing juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan

^{73 44}Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, 318

independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteri-kriteria yang telah ditetapkan.⁷⁴

Pada penjelasan teori yang telah ada diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang evaluasi yang telah dilakukan dipondok pesantren sidogiri pasuruan selaras dengan teori yang ada diatas. Dalam penerapannya kegiatan pengawasan telah dilaksanakan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya, secara sederhana proses pengawasan yang telah dilakukan:

- a. Memantau (Monitoring)
- b. Menilai
- c. Melampirkan hasil temuan, berupa kinerja aktual maupun hasilnya.

Sasaran auditing antara lain yaitu kas, yang dimasukkan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan jumlah uang yang ada melalui catatannya. Sasaran lain yaitu pengirisan barang, yang bukan saja membandingkan antara jumlah barang yang ada dengan barang yang seharusnya ada, dan memeriksa cara-cara penyimpanannya, pemeliharannya dan penggunaannya.

Manfaat auditing untuk menindak lanjuti jika terjadi penyimpangan. Pemeriksaan yang sebenarnya tidak hanya dilakukan ketika anggaran telah direalisasikan namun juga sebelumnya. Pemeriksaan ini meliputi pada kebijakan, kematangan dalam perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan dan menyangkut pada kebijakan yang berkaitan dengan

⁷⁴ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, 267

pondok pesantren yang digunakan dalam merealisasikan dana. Sesuai dengan manfaatnya auditing sangat penting dan bermanfaat bagi beberapa pihak antara yaitu:⁷⁵

- a. Bendahara yang bersangkutan
 - 1) Bekerja dengan arah yang sudah pasti
 - 2) Bekerja dalam target yang ditentukan
 - 3) Dapat mengukur tingkat keterampilan
 - 4) Control bagi diri untuk menyalah gunakan uang
- b. Bagi lembaga yang bersangkutan
 - 1) Memungkinkan adanya sistem kepemimpinan yang terbuka
 - 2) Memperjelas batasan wewenang dan tanggung jawab petugas
 - 3) Tidak menimbulkan saling kecurigaan
 - 4) Terdapat arah yang jelas dalam penggunaan uang
- c. Bagi atasan
 - 1) Mengetahui semua anggaran yang digunakan dan dilaksanakan
 - 2) Mengetahui tingkat pelaksanaan program dan hambatannya demi menyusun anggaran tahun berikutnya
 - 3) Diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan, dan kelancara oengeluaran
 - 4) Dapat diketahui tignkat kecermatan dan mempertanggung jawabkan.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, 318-319

- 5) Untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahunan masa lampau sebagai umpan balik perencanaan pada masa akan datang
 - 6) Untuk arsip dari tahun ketahun
- d. Bagi pemeriksa keuangan
- 1) Ada patokan yang jelas dalam mengadakan pengawasan terhadap uang milik lembaga
 - 2) Ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang dilakuakn di pondok pesantren sidogiri pasuruan terkait dengan “manajemen pembiayaan dalam membangun kemandirian pesantren di pesantren sidogiri pasuruan, jawa timur” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren sidogiri pasuruan

Dalam proses manajemen pembiayaan pondok pesantren sidogiri untuk membangun kemandirian pesantren dengan menerapkan tahapan pelaksanaan perencanaan yaitu: evaluasi program yang telah dijalankan, rapat pleno 1 untuk merancang program yang akan datang, dan rapat pleno 2 untuk pengesahan program yang telah direncanakan.

2. Penerapan manajemen pembiayaan pondok pesantren Sidogiri

Dalam penerapan pembiayaan dalam membangun kemandirian pesantren. Besar anggaran yang akan diberikan menyesuaikan dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Yang diambilkan dari uang pendaftaran santri 20% dan dan 80 % dari hasil kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pondok pesantren secara mandiri. pengambilan anggaran belanja dilakukan oleh ketua pelaksanaan program kegiatan yang telah diketahui dan diverifikasi oleh kordinator

3. **Evaluasi evaluasi manajemen pembiayaan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan**

Dalam evaluasi manajemen pembiayaan untuk membangun kemandirian pesantren pengurus melaksanakan kegiatan Pelaporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilakukan pada tiap tahun. Dan melakukan pemeriksaan keuangan (*auditing*) dengan cara melaporkan semua hasil pendapatan dan pengeluaran dalam satu tahun.

B. Saran

Saran ini hanya sebuah bentuk pemikiran peneliti setelah melakukan penelitian di pondok pesantren sidogiri pasuruan mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada kemudian hari:

1. Bagi mahasiswa hendaknya dapat mengembangkan lanjutan pada penelitian dengan pembahasan yang lebih mendalam.
2. Kepada dewan pengurus pondok pesantren sidogiri dalam menentukan anggaran belanja pesantren perlu lebih fokus lagi demi tercapainya kebutuhan kegiatan pesantren demi kelancarannya pendidikan di pesantren.
3. Dalam penunjang kemandirian pesantren perbanyak lagi perkembangan sektor kewirausahaan sehingga dapat menopang secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan dan perbanyak keikutsertaan para santri dalam kegiatan kewirausahaan yang telah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon dkk. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bharuddin dan Moh. Makin. 2012. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Clifford, Morgon, T. Richard A King. 1971. *Introduction to Psychology*. Tokyo : Crow Hill.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Enung, Fatimah. 2006. *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fattah, Nanang. 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah. Nanang. 2000. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan Cetakan I*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Holstein, Herman. 2009. *Murid Belajar Mandiri*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)hlm.5
- J.I.G. Drost. 1986. *Sekolah Mengajar atau Mendidik*. Yogyakarta: Kanisius 2004), Hlm.39
- Malayu, Hasibuan. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Malayu. S.P. Hasibuan. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manulang, M.1992. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Miftahol Arifin, Jurnal: Manajemen Keuangan Pondok Pesantren, , Diakses dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/2745/2022>,
- Mulyono. 2010. *Konsep pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mustaqim. 2001. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Suad Husnan & Enny Pudjiastutik. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, 2009. *Manajemen Pendidikan* .Yogyakarta: Aditya Media
- Sutojo, Heru. 1997. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Syah, Muhibbin. 1995. Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- T. Hani Handoko.1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, Edisi 2
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2014. *Manajemen Pendidikan* Bandung: Alfabeta.
- Tirtaraharja, Umar dan Lasula. 2000. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Zakiah, Daradjat. 1976. Perawatan Jiwa Untuk Anak. Jakarta: Bulan Bintang.

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PESANTREN DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN JAWA TIMUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen 2. Pembiayaan 3. Membangun 4. Kemandirian 5. Pesantren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua III 2. Sekertaris Umum 3. Bendahara Umum 4. Bendahara I 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendekatan Penelitian: kualitatif b. Lokasi Penelitian: Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur c. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi d. Keabsahan Data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Trigulasi Sumber 2. Trigulasi Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan yang diterapkan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam membangun kemandirian pesantren ? 2. Bagaimana penerapan manajemen pembiayaan dalam Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ? 3. Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Salman Al Farisi
Nim : T20163040
Program studi : Manajemen Pendidikan Islam
Institit : UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PESANTREN DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN JAWA TIMUR secara keseluruhan adalah hasil atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Juli 2023



Salman Al Farisi
NIM. T20163040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005, Kode Pos 68136
Website : <http://ftik.iain-jember.ac.id> e-mail : tarbiyah.iainjember@gmail.com

Nomor : B-2399/In.20/3.a/PP.009/04/2023
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Pengasuh Pesantren Sidogiri
Pasuruan Jawa Timur

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

NIM : T20163040
Nama : Salman Al Farisi
Semester : Semester empat belas
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PESANTREN DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN JAWA TIMUR" selama 30 (tiga puluh) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Jember, 01 April 2023

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

MASHUDI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN JAWA TIMUR

No	Tanggal	Kegiatan
1	29 November 2022	Pra penelitian untuk memastikan kondisi yang ada di lapang dan melengkapi data proposal skripsi
2	02 Desember 2022	Menyerahkan surat penelitian dan silaturahmi di Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur
3	06 Desember 2022	Observasi dan penggalian data kegiatan di Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur
4	08 Desember 2022	Interview tentang kurikulum pesantren di Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur
5	10 Desember 2022	Interview, bagian kurikulum tentang kurikulum pesantren di Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur
6	13 Desember 2022	Interview guru tentang penerapan kurikulum pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur
7	14 Desember 2022	Observasi dan meminta dokumentasi pada bagian Tata Usaha untuk kelengkapan data
8	15 Desember 2022	Meminta Dokumentasi pada kesiswaan untuk melengkapi data
9	16 Desember 2022	Interview dan Observasi tambahan untuk melengkapi data dan meminta Tanda tangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan yang diterapkan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam membangun kemandirian pesantren ?
2. Bagaimana penerapan manajemen pembiayaan dalam Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?
3. Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur ?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur
2. Profil Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur
3. Visi, Misi dan tujuan
4. Data guru
5. Data siswa
6. Struktur organisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data diri

Nama : Salman Alfarisi
Tempat tgl lahir : Bondowoso, 09 Januari 1999
Agama : Islam
Nama orang tua : Moch Syafi'i (ayah) dan Nur Imamah (ibu)
No. Telfon : +62 895-1921-3341
Email : farisalsalman4@gmail.com

Riwayat pendidikan

- 1 TK PGRI 08 TEGALAMPEL
- 2 SDN KARANGANYAR 02
- 3 MTsN Bondowoso 2
- 4 MAN BONDOWOSO
- 5 UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jembe